

**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
PERIODE RENCANA BISNIS
2024**



PT BPR HAYURA ARTALOLA

**JL. Raya Pasirjambu No.139 Kab.Bandung
Tlp: 022-5928680
www.bprhayura.co.id**

**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
PERIODE RENCANA BISNIS 2024
PT BPR HAYURA ARTALOLA**

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi memerlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayainya, karena pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana. Oleh karena itu perbankan sangat diperlukan dan menjadi sendi penting dalam perekonomian nasional. Dengan kondisi perbankan yang sehat, efisien dan bermanfaat bagi perekonomian menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kelangsungan pembangunan ekonomi.

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih mudah tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian jika dibandingkan dengan perbankan lainnya. BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah, Keberadaan BPR pada umumnya dekat dengan masyarakat yang membutuhkan dengan fungsinya sebagai lembaga intermediary mengimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan Tabungan dan Deposito juga menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Dalam realisasi rencana Bisnis tahun 2024 masih dihadapkan pada berbagai kendala secara makro ekonomi terjadi pelemahan daya beli masyarakat yang begitu berpengaruh pada perkembangan usaha BPR yang seakan pemulihan paca Pandemi covid-19 yang belum pulih sepenuhnya maupun tingkat persaingan baik antar BPR, bank umum dan lembaga lain terutama pinjaman online, yang begitu ketat namun kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Usaha-usaha yang dilakukan management dalam rangka mengembangkan bank di tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan secara kualitas dan kuantitas dengan indikator terjadi terjadi pertumbuhan volume usaha sebesar 12% dimana pada posisi Desember 2023 sebesar Rp.40.255.867,-ribu menjadi sebesar Rp.45.142.354.726,-ribu di Desember 2024 kenaikan volume usaha berkontribusi adanya pertumbuhan Kredit yang diberikan sebesar 8 % ini berdampak pada kenaikan laba usaha di tahun 2024 sebesar 34% .

Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini tentunya harus tetap dipertahankan bahkan harus lebih ditingkatkan terutama dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian saat ini yang cenderung tetap mengalami perubahan yang tentunya harus diantisipasi dengan kebijakan dan strategi perbankan yang lebih hati-hati lagi terutama dalam menghadapi persaingan yang cukup ketat baik antar BPR, bank Umum maupun lembaga pembiayaan yang lainnya. di tahun 2024 perekonomian secara makro masih dihadapkan pada situasi yang belum begitu membaik ditengah situasi geo politik global dengan terjadinya perang timur tengah, dan secara politik dalam negeri merupakan tahun politik pemilihan pilpres dan legislatif.

Perkembangan yang telah dicapai selama ini didapat dengan kerja keras disamping memberikan pelayanan yang terbaik PT BPR Hayura Artalola juga senantiasa mempunyai keunggulan-keunggulan yang kompetitif sehingga customer BPR Hayura tidak berpaling ke bank yang lain.

1. Umum

Susunan Kepengurusan PT BPR Hayura Artalola terdiri dari :

Dewan Komisaris :

Komposisi Kepengurusan untuk Dewan Komisaris efektif tanggal 7 Juni 2018 telah ditata usahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas jasa keuangan dengan susunan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

Komisaris

1. H Mutiq Yusmita Hadyat selaku Komisaris Utama
2. Tatan Suratman selaku Komisaris

Direksi :

1. Dedi Rusamsi selaku Direktur Utama
(Menjabat sampai Dengan Mei 2024 karena wafat)
2. Teulis Ratna Komala selaku Direktur
(Menjabat Sebagai PJS. Dirut Mulai Mei 2024 setelah Bpk Dedi Rusamsi Wafat)

Pejabat Eksekutif PT BPR Hayura Artalola terdiri dari :

1. Usep Subhan selaku Kepala Bagian Marketing
2. Tito Tinarsa, SE selaku Kepala Bagian Kepatuhan dan Mangement Resiko
3. Dadi Riyadi Rudinasyah selaku Kepala Bagian Operasional

4. Agus Cahya Sopian, selaku Audit Internal.
5. Yayan Taryana, selaku Kepala Bagian Supervisi
6. Dania Mulyati, selaku Kepala Bagian Umum dan SDM

Ringkasan Riwayat Hidup Anggota Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif.

DEWAN DIREKSI

DIREKTUR UTAMA

1. Nama : Dedi Rusamsi
- Tempat/Tgl lahir : Bandung, 01 Januari 1968
- Alamat : Komp Putraco Griya Jagabaya D5 Banjaran Kabupaten Bandung.
- Pekerjaan : Direktur Utama PT BPR Hayura Artalola,
- Alamat Pekerjaan : Jl Raya Ciwidey Pasir Jambu No.39 Ciwidey Kabupaten Bandung.

Latar Belakang Pendidikan

- 1975 - 1981 : SDN Tanjungsari I, Banjaran.
- 1981 - 1984 : SMPN, Banjaran
- 1984 - 1987 : SMAN 11, Bandung
- 1987 - 1992 : STKS, Bandung

Pendidikan Non Formal

- 1993 : Pelatihan Manajemem BPR, Intern
- 1994 : Pelatihan Manajemem Perkreditan , Bank Duta&HBPR
- 1998 : Pelatihan Managemen Kredit Mikro, Bank Jabar & BI
- 1999 : Pelatihan Pengembangan Hubungan Bank dan Kelompok (PHBK), PKM Bank Indonesia.

Pengalaman Kerja

- 1992 - 1993 : Koordinator Marketing , PT BPR Artalola.
- 1993 : Team Audit Akuisisi , PT BPR Hayura Artalola
- 1993 - 1996 : Kepala Bagian Kredit, PT BPR Hayura Artalola
- 1996 - 1997 : Direktur Dana & Umum , PT BPR Arta Lolantara
- 1997 sd Mei 2024 : **Direktur Utama PT BPR Hayura Artalola. (Wafat 24 Mei 2024)**

Organisasi

- : Pengurus DPD Perbarindo sebagai Seksi SDM & Diklat

DIREKTUR OPERASIONAL

2. Nama : Teulis Ratna Komala
- Tempat/Tgl Lahir : Bandung 23 Maret 1971
- Alamat : Ciwidey Kulon Rt. 01/13 Ciwidey Kabupaten Bandung.
- Pekerjaan : Pegawai Swasta sebagai Direktur Operasional PT BPR Hayura Artalola.
- Alamat Pekerjaan : Jl Raya Ciwidey Pasirjambu No,139 Ciwidey

Kabupaten Bandung.

Latar Belakang Pendidikan

1977 – 1983	: SDN 1, Ciwidey
1983 – 1987	: SMPN 1, Ciwidey
1987 – 1990	: STM Negeri Penerbangan , Bandung
1991- 1992	: Administrasi Perkantoran, Bandung
2003 – 2006	: STIE AKPI, D3 Management Dana Bank, Bandung

Pendidikan & Pelatihan

1992	: Komputer Akuntansi
1997	: Pelatihan Manajemen Perbankan , Intern
1998	: Pelatihan TOF PHBK (Training Of Fasilitator Pola Hubungan Bank dengan Kelompok), Bank Indonesia.
1999	: Pelatihan Leadership , Bank Indonesia.
2000	: Bisnis Plan, Bank Indonesia.

Pengalaman Kerja

1991	: Asuransi Bumi Putera sebagai Agen, Bandung
1992 – 1993	: Marketing, PT BPR Hayura
1993 – 1994	: Pembukuan, PT BPR Hayura
1994 – 1995	: Kepala Bagian Umum, PT BPR Hayura
1995 – 1997	: Kepala Bagian Adm & Umum, PT BPR Hayura
1997 – 2024	: Direktur Operasional dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, PT BPR Hayura Artalola
2024 Mei - Sekarang	: Menjabat sebagai PJS Direktur utama paska wafatnya Bpk.Dedi Rusamsi Per Mei 2024

PEJABAT EKSEKUTIF

KEPALA BAGIAN KEPATUHAN DAN MANAGEMEN RESIKO

1.	Nama	: Usep Subhan
	Tempat/Tgl Lahir	: Bandung, 25 Desember 1971
	Alamat	: Komplek Sukarasa Permai Blok B No. 46 Rt.01/18 Desa Tenjolaya Kec Pasirjambu Kabupaten Bandung.
	Pekerjaan	: Pegawai Swasta, PT BPR Hayura Artalola
	Jabatan	: Kepala Bagian Marketing

Latar Belakang Pendidikan

1978 – 1984	: SDN Nenon, Ciwidey
1984 – 1987	: SMPN I , Ciwidey
1987 – 1990	: SMAN Baleendah, Baleendah
2005 – 2008	: STIE/Dharma Negara, Program D3 Jurusan

Management Keuangan Perbankan .

Pelatihan dan Kursus

1991	: Advance Englis Course, Harvard Englis
1992	: Computer Course Firdaus Computer Course
1993	: Managemen BPR. In House
1996	: Pejabat BPR , Bank Indonesia Bandung
1998	: Managemen Keuangan Mikro, Bank Indonesia
1999	: Rapid Rural Apraisal, Bank Indonesia
2000	: Exposure Training Problem, Bank Indonesia
2001	: Pelatihan Pejabat BPR, Perbarindo
2003	: Penanganan Kredit Bermasalah, Perbarindo & Bank Indonesia.
2003	: Teknologi Informasi Lembaga Keuangan Mikro, PT PNM
2004	: Internet bagi BPR, PT PNM
2005	: Penanganan Kredit Bermasalah, Bank Indonesia
2006	: Penyusunan Rencana Bisnis, Balancing Score Card,Perbarindo.
2009	: AR & Collection Team
2010	: Human Skill Improvemen
2011	: Penyusunan Program Audit & laporan Bagi Audit Internal PNM & SAK Etap, Bank Indonesia.
2012	: Audit Internal, Perbarindo & APU PPT.
2013	: Leadership Team Building. In House
2014	: Sertifikasi Direktur 1, Certif oleh Lembaga Sertifikasi

Profesi Lembaga

	Keuangan Mikro.
2019	: Survailen Serifikasi Direktur 1
2024	: Survailen Serifikasi Direktur 1

Pengalaman Bekerja

1993 – 1996	: Marketing . PT BPR Hayura Artalola
1996 - 1998	: Bagian dana. PT BPR Hayura Artalola
1998 – 2000	: Kepala Bagian Dana, PT BPR Hayura Artalola
2000 – 2003	: Kepala Bagian Kredit, PT BPR hayura Artalola
2003 - 2005	: Kepala Bagian Operasional , PT BPR Hayura Artalola.
2005 - 2008	: Audit Internal .
2018 - 2024	: Kepala Bagian Kepatuhan dan Managment Resiko.
2024 – Sekarang	: Kepala Bagian Marketing Bisnis

KEPALA BAGIAN OPERASIONAL

2. Nama	: Dadi Riyadi Rudiansyah
Tempat/tgl Lahir	: Bandung, 25 April 1997
Alamat	: Kp. Sukagalih Rt.01 Rw.04 Desa-Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.
Pekerjaan	: Pegawai Swasta PT BPR Hayura Artalola
Jabatan	: Kepala Bagian Operasional

Latar Belakang Pendidikan

2003 – 2009 : SDN , Cisondari 1
2009 – 2012 : SMPN I, Ciwidey
2012 – 2015 : SMAKN 1, Katapang
2015 – 2018 : LPKIA , Jurusan Teknik Informatika, Bandung

Pelatihan dan Kursus

2019 : Workshop Hardware dan Software
Pelatihan Penyelesaian Kredit Bermasalah
Pelatihan APU & PPT
2020 : Pelatihan Manajemnet Resiko
Pelatihan Team Managing Umprovement
2021 : Pelatiha Perencanaan Keuangan Mikro
2022 : Pelatihan Digital Leadership Memperkuat Transformasi Digital.

Pengalaman Kerja

2018 : PT Layanan Media
2018 : IT Suport, PT BPR Hayura Artalola
2020 : Kepala Seksi Back Office, PT BPR Hayura Artalola
2022- Sekarang : Kepala Bagian Operasional, PT BPR hayura Artalola

INTERNAL AUDIT

3. Nama : Agus Cahya Sopyan
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 12 Agustus 1975
Alamat : Pagersari Rt.01/05 Ciwidey Kabupaten Bandung
Pekerjaan : Pegawai Swasta, PT BPR Hayura Artalola
Jabatan : Audit Internal

Latar Belakang Pendidikan

1983 – 1988 : SDN Pasirjambu, Ciwidey
1988 – 1991 : SMPN Pasirjambu, Ciwidey
1991 – 1994 : SMAN Banjaran
1999 – 2000 : Lembaga Pendidikan Primagama, Program D3 Jurusan Manajemen Dana Bank

Pelatihan dan Kursus

2002 : Manajement Kredit BPR, Perbarindo
2005 : Kredit Bermasalah, PNM
2007 : Penggalian Potensi UMKM Metoda Rapid Rural Appraisal, BI
2009 : Eksekusi Jaminan Kredit macet, Alpha Omega
2010 : Managing For Improvement Performance, PT Bisma
2010 : Human Skill , OUT3 ACT
2012 : APU & PPT, Metha Vision
2013 : Pendalaman APU & PPT, Metha Vision
2014 : Konsultatif Selling, Markplus

Pengalaman Bekerja

2000 – 2009 : Marketing, PT BPR Hayura Artalola
2009 - 2015 : Kepala Bagian Marketing.PT BPR Hayura Artalola
2015 - 2022 : Kepala Bagian Dana PT BPR hayura Artalola
2022 : Internal Audit, PT BPR Hayura Artalola

KEPALA BAGIAN MARKETING

4. Nama : Tito Tinarsa,SE
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 13 Januari 1971
Alamat : Jl Manggahang I No. 13 Rt.02/05 Kel Manggahang Kec
Baleendah Kabupaten Bandung.
Pekerjaan : Pegawai Swasta, PT BPR Hayura Artalola
Jabatan : PE Kepatuhan dan Management Resiko

Latar Belakang Pendidikan

1977 – 1983 : SDN Pelita, Bandung
1983 – 1986 : SMPN 28, Bandung
1986 – 1989 : SMAN 11, Bandung
1989 – 1997 : STEIB/Widyatama, Program S1 Jurusan
Akutansi.

Pelatihan dan Kursus

2002 : Manajemen Pengeloaan Dana, PT PNM
2004 : Fitur Aplikasi LKMS Online, PT PNM
2005 : Selling Skill, BCA
2006 : Penyusunan Rencana Bisnis, PT Bisma

Pengalaman Bekerja

1998 – 2009 : ICS. PT BPR Hayura Artalola
2009 - 2013 : Unit Manager Dayeuh Kolot, PT PNM
2013 – 2014 : Koordinator manager Unit, BMT Sanama
2014 – 2015 : Kepala Cabang ,PT BPR Ukabima
2016 - 2018 : Kepala Bagian Kredit , PT BPR Hayura Artalola
2018 - 2022 : Internal Audit
2022- 2024 : Kepala Bagian Marketing
2024 -Sekarang : pe Kepatuhan Dan Manajemen Risiko

KEPALA BAGIAN UMUM DAN SDM

5. Nama : Dania Mulyati
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 22 Januari 1982
Alamat : Kp Warung Rt.02/002 Desa Tenjolaya Kecamatan
Pasirjambu Kabupaten Bandung.
Pekerjaan : Pegawai Swasta, PT BPR Hayura Artalola
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan SDM

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas/ Jurusan	Lulus/Gelar Yang Dicapai
Sekolah Dasar	1989-1995	SDN Cihanjavar	-	-
Sekolah Menengah Pertama	1995-1998	SMPN 1 Ciwidey	-	-
Sekolah Menengah Umum	1998-2001	SMAN 1 Ciwidey	-	-
Akademi/ Perguruan Tinggi	2001-2002	D1 (Lembaga Pendidikan)	Komputer Akutansi	-

RIWAYAT PEKERJAAN

TAHUN	PERUSAHAAN	JABATAN
2003-2009	PT. BPR HAYURA ARTALOLA	Teller
2009-2013	PT BPR Hayura Artalola	Admin Support Kredit
2013-2014	PT BPR Hayura Artalola	Head Teller
2014-2018	PT BPR Hayura Artalola	Kasie Front Office
2018	PT BPR Hayura Artalola	Kepala Bagian Umum & Personalia

PELATIHAN YANG PERNAH DIKUTI

NAMA PELATIHAN	TAHUN	PENYELENGGARA	LOKASI
Aplikasi Manajemen Risiko Operasional, Risiko Hukum & Risiko Kepatuhan	2015	MethaVision	Kantor PT.BPR HAYURA ARTALOLA
Team Work Building My Job My Adventure	2016	Out Act	Cikole Lembang
Service Excellent	2016	Metha Vision	Kantor PT.BPR HAYURA ARTALOLA
Service Secret	2016	MarkPlus	Bandung

KEPALA BAGIAN SUPERVISI

6. Nama : Yayan Taryana
Tempat / tanggal lahir : Bandung 11 Nopember 1973
Alamat : Kp Sukasari Lio Rt.03/01 Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT BPR Hayura Artalola
Jabatan : Kepala Bagian Supervisi

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas/Jurusan	Lulusan/Gelar
SD	1979-1985	SDN Babakan Tiga		
SMP	1985-1988	SMP PGRI Ciwidey		
SMU	1988-1991	SMA Soreang Putera		
Akademi/Perguruan Tinggi	2014-2019	STIE DNBS	Manajemen	S/D Sekarang

PELATIHAN/KURSUS YANG PERNAH DIKUTI

Nama Pelatihan/Kursus	Tahun	Penyelenggara	Lokasi
Kursus Komputer	1994	LPK PRAMEDIA	Bandung
Pelatihan Kerja P3T	1998	KOPKAR BMT ASSALAM	Bandung
Menangani Pembiayaan Bermasalah	2005	PNM	Bandung
Proses Dan Prosedur Pemberian Kredit Yang Sehat Pada BPR	2007	PT BISMA	Garut
Perlindungan Konsumen, Revisi Perjanjian Kredit & Penyusunan SOP Perlindungan Konsumen	2014	Methavision	Ciwidey
Aplikasi Manajemen Risiko Operasional, Risiko Hukum & Risiko Kepatuhan	2015	Methavision	Ciwidey
Kualitas Pelayanan Prima (Service Excellent)	2016	Methavision	Ciwidey
Team Work Building PT BPR Hayura	2016	OUT ACT	Lembang
Collection & Penyelamatan Kredit	2017	Bank BJB	Cirebon
Leadership Training (The Champions Mindset)	2018	MINDSET INDONESIA	Ciwidey

RIWAYAT PEKERJAAN

Tahun	Perusahaan	Jabatan	Tanggung Jawab	Prestasi
1998	PT BPRS TOAT	MARKETING	Marketing Lending & Funding	
1998-1999	PT BPR BALI RUKUN MANDIRI	MARKETING KREDIT	Monitoring, Marketing Lending & Funding	
1999-2018	PT BPR HAYURA ARTALOLA	TEAM LEADER	Pelaksana Koordinator AO, Pemasaran Kredit & Monitoring Nasabah	
2018	PT BPR HAYURA ARTALOLA	KEPALA BAGIAN KREDIT	Fungsi Pengawasan Bagian Bisnis	
2022	PT BPR HAYURA ARTALOLA	KEPALA BAGIAN SUPERVISI	Fungsi Pengawasan Bagian Kolektion	

Komposisi Kepemilikan Saham PT BPR Hayura Artalola terdiri dari :

Sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-99/KR.2012/2016 tanggal 29 Januari 2016, bahwa perubahan anggaran dasar dari Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) menjadi sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta penambahan modal di setor sebesar Rp1.200.000.000 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*), disetujui dan ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, komposisi saham BPR menjadi:

No	Nama Pemilik	Jumlah lembar	Jumlah Nominal	Persentase
1	Hj. Gusti Nurmahrita	22.380	1.119.000.000	50,86%
2	H. Mutiq Yusmita	20.540	1.027.000.000	46,68%
3	Dedi Rusamsi	1.080	54.000.000,00	2,45%
Jumlah		44.000	2.200.000.000	100,00%

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola selanjutnya disebut “Bank” yang didirikan di Republik Indonesia yang bergerak dibidang jasa perbankan

didirikan pada tanggal 20 Desember 1990 dengan nama PT BPR Hayura sesuai dengan akta notaris No. 6 pada Notaris Komar Andasmita, SH dan telah memperoleh persetujuan atau pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 3 Mei 1991 Nomor : C2-1.538.HT.01.01.TH.91.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 terjadi perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat, BPR Hayura Berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola dan telah di daftarkan ke kantor Kemenhukam sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 14 Tanggal 21 Pebruari 2024 dengan surat persetujuan Kemenhukam Nomor AHU 0012239.AH.02.TAHUN 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola tanggal 23 Pebruari 2024

PT BPR Hayura mulai beroperasi pada tanggal 17 Juli 1991 dengan alamat Kantor Jl Siliwangi Ciwidey Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat tanggal 31 Januari 1994 No. 218 pada Notaris Adjie Subandi Dharma.,SH mengubah nama PT BPR Hayura menjadi PT BPR Hayura Artalola dan telah memperoleh persetujuan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1995 Nomor : C2-12.814.HT.01.04.th.95.

Kantor Operasional Bank Perkreditan Rakyat berlokasi di Jl Raya Pasirjambu No. 139 Desa dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dengan alamat kantor kas di Jl. Raya Soreang-Banjaran No. 179 Kabupaten Bandung dan Jl. Raya Rancabali KM 7 No. 1 Ciwidey Bandung

Untuk lebih lengkapnya laporan keuangan tahunan ini dapat dijabarkan melalui perbandingan-perbandingan dengan Neraca dan Laba/rugi tahun lalu.

Laporan Aktivitas Usaha Tahun 2024

Penghimpunan Dana

Simpanan

Pencapaian penghimpunan dana pihak ketiga melalui produk simpanan yaitu dari Tabungan dan Deposito mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 11 % dari perolehan yang sama di tahun lalu yang disebabkan adanya pengalihan dana dalam bentuk investasi yang lain menjadi simpanan seiring dengan terus bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap PT BPR Hayura Artalola disamping adanya strategis aktivasi produk-produk tabungan, dengan jumlah Simpanan sampai dengan Desember 2024 adalah sebesar Rp.28,597,995,- ribu.

Jumlah penyimpan sampai Desember 2024 adalah sebanyak 8.744 orang yang terdiri dari Penabung 8.556 orang dan Deposan sebanyak 188 orang.

Pinjaman Yang Diterima

Pada anggaran tahun 2024 dana yang berasal dari linkage dengan Bank Perekonomian Rakyat Karyajatnika Sadaya dengan skim pemberian kredit modal kerja sebesar Rp. 4.066.075,-ribu

Perolehan dana dari pinjaman yang diterima menunjukkan kenaikan 100% dikarenakan tahun sebelumnya tidak ada fasilitas linkage, .

Penyaluran Dana

Kredit Yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan melalui kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga atau masyarakat pelaku usaha Mikro posisi akhir tahun Desember 2024 sebesar Rp.36.283.116,- ribu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yakni sebesar 8% dari perolehan yang sama di tahun lalu, ini disebabkan adanya kenaikan penghimpunan dana pihak ketiga yang tersalurkan melalui produk kredit yang diberikan meskipun kondisi perekonomian belum begitu membaik.

Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Tingkat pengembalian atas pinjaman yang diberikan posisi Desember 2024 mengalami perbaikan kualitas kredit sebesar 0,11 % dari posisi yang sama tahun lalu dari sebesar 98,32 % menjadi 99,43 %.

Kualitas Aktiva Produktif dengan pencapaian tersebut di atas merupakan perbaikan kinerja penanganan kredit bermasalah juga adanya write off di Desember 2024.

Tahapan penyesuaian atas debitur-debitur yang bermasalah terus diupayakan baik dilakukan secara pendekatan personal maupun melibatkan pihak ketiga yang berpengaruh terhadap debitur ataupun melakukan penghapusbukuan sesuai prosedur yang berlaku atau bahkan dengan eksekusi jaminan.

Secara umum dapat diuraikan bahwa penyebab utama terjadinya kredit bermasalah paling banyak disebabkan oleh kegagalan usaha yang diakibatkan seperti gagal panen, melemahnya daya beli masyarakat dan penyebab-penyebab lain pengalihan rencana penggunaan dana yang dilakukan oleh debitur tidak sesuai dengan rencana awal,

Pendapatan dan Biaya

Pendapatan

Pendapatan yang berhasil diperoleh selama tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 11,062,413,- ribu terjadi kenaikan bila dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya yakni sebesar 11% ini disebabkan adanya kenaikan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan dan pendapatan operasional lainnya dari payment poin .

Biaya- Biaya

Biaya secara keseluruhan pada tahun 2024 Rp. 8,945,053 ribu mengalami peningkatan sebesar 9% dari perolehan biaya pada posisi sama di tahun lalu, hal ini dikarenakan adanya kenaikan-kenaikan pada komponen beban yang mendukung kegiatan operasional.

Secara garis besar pengeluaran atau beban dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Beban administrasi dan umum Rp.5,013,564,- ribu merupakan komponen pembiayaan terbesar dengan alokasi sebesar 56% dari total beban mengalami

kenaikan sebesar 6% dari tahun lalu, dalam beban administrasi dan umum ini termasuk komponen beban personalia dan beban-beban sehubungan dengan barang dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan operasional yang mengalami kenaikan disebabkan adanya penyesuaian pendapatan karyawan karena kenaikan UMR dan masa kerja karyawan.

2. Beban bunga dengan alokasi sebesar 1.752.241 atau 20% dari total beban operasional keseluruhan, yang terdiri dari beban bunga dana antar bank dan dana-dana dari pihak ketiga berupa beban bunga Tabungan dan beban bunga Deposito terjadi kenaikan sebesar 24% karena jumlah penghimpunan dana pihak ketiga mengalami kenaikan.

Beban Penyisihan Aktiva produktif juga mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 23 % dari posisi yang sama tahun lalu sebagai dampak dari perbaikan kualitas NPL.

Dengan hasil yang diperoleh dari sisi pendapatan naik sebesar 11 % dan beban naik 23% dari tahun lalu, maka laba yang dihasilkan di tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.117360,- ribu sebelum pajak terjadi terjadi kenaikan laba yang cukup signifikan sebesar 26% dari perolehan tahun lalu .

Dari laba tersebut dicadangkan untuk pembayaran Pajak PPH Pasal 25 Badan sebesar Rp. 380.729.-ribu . Sehingga laba bersih yang diperoleh di tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.742.519 ribu

- **Perbandingan Rasio Permodalan**

	Des'24	Des'23
$\frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{ATMR}} =$	$\frac{7.043.093.000}{27.365,.723.000} = 25.73\%$	$\frac{6.755.953.153}{25.622.236,838} = 26.37\%$

Jika menganalisa rasio ini BPR mengalami penurunan rasio CAR sebesar 0.64% disebabkan adanya peningkatan ekspansi kredit sehingga rasio CAR mengalami penurunan meski tidak terlalu signifikan.

- **Kualitas Aktiva Produktif** dengan dengan dua indikator perbandingan dengan rincian sebagai berikut :

-

	Des'24	Des'23
1. $\frac{\text{Aktiva Yg Diklas}}{\text{Aktiva Produktif}} =$	$\frac{691.149.136}{43.967.710.534} = 1.57\%$	$\frac{656.215.586}{38.952.554.392} = 1.68\%$
2. $\frac{\text{PPAP Telah Dibentuk}}{\text{PPAP Wjb Dibentuk}} =$	$\frac{295.199.649}{295.199.649} = 100\%$	$\frac{338.668.604}{338.668.604} = 100\%$

Jika menganalisa Rasio Rasio Kualitas Aktiva Produktif maka posisi Desember 2024 terjadi perbaikan sebesar 0.11% dengan kualitas aktiva produktif pada posisi yang sama di tahun lalu yang disebabkan adanya perbaikan kualitas kredit yang diberikan yang disebabkan adanya penyelesaian kredit kredit bermasalah.

Rincian pemberian kredit menurut kolektibilitas posisi Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Kolektibilitas	Baki Debet	Rasio
Lancar	Rp. 34.076.426.933	92.62 %
Dalam Perhatian Khusus	Rp. 1.806.030.169	4.91 %
Kurang Lancar	Rp. 302.218.400	0.82 %
Diragukan	Rp. 265.378.156	0.72 %
Macet	Rp. 341.006.319	0.93 %
Jumlah	Rp. 36.791.9059.977	100.00%

Jika melihat dari rasio-rasio diatas maka rasion kredit NPL adalah sebesar 2.47 gross dan 2.17% netto

Jumlah Perbandingan Kredit bermasalah terhadap total kredit adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Jumlah Kredit}} = \frac{908.602.875,-}{36.791.059.977,-} = 2.47\%$$

Sebagian besar dari kredit bermasalah disebabkan terjadinya kegagalan usaha, seperti gagal panaan, menurunnya daya beli masyarakat, perubahan pola konsumsi masyarakat.

- **Rentabilitas**

	Des'24	Des'23
1. $\frac{\text{Labasebelum pjik}}{\text{Rata-rata Asset}} =$	$\frac{2.123.249,- \text{ ribu}}{43.168.3021,- \text{ ribu}} = 4.92\%$	$\frac{1.600.316.663}{37.185.384.258} = 4.30\%$

Kemampuan perusahaan dalam menghimpun laba mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rasio perolehan laba tahun lalu dengan penurunan sebesar 0,34 % sebagai akibat dari terjadinya kenaikan beban yang menunjang kegiatan operasional.

	Des'24	Des'23
2. <u>By Operasional</u> =	$\frac{8.945.052.918}{11.062413.732} = 80.86\%$	$\frac{8.244.186.431}{9.921.446.667} = 80,09\%$
Pend Operasional		

Jika menganalisa Rasio Efisiensi ini kondisi perusahaan relatif sama mengalami kenaikan sebesar 0.77% dari posisi sama di tahun lalu dengan demikian manajemen telah berhasil melakukan efisiensi dan efektifitas.

- **Likuiditas**

Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari perkembangan rasio likuiditas sebagai berikut :

	Des'24	Des'23
1. <u>Alat Likuid</u> =	$\frac{7.140.497.000}{28.642.237.000} = 24.93\%$	$\frac{5.233.581.843}{25.881.083.797} = 20.22\%$
Hutang Lanca		

Pada posisi yang sama di tahun yang berbeda, untuk penyediaan alat likuid rasionya masih diatas 10% cukup aman sebagai cadangan likuiditas, sehingga dana-dana yang ada masih banyak yang belum diproduktifkan namun jika dibandingkan rasio Likuiditas posisi Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 4.71% ini berarti dalam pengelolaan sumber dana harus diefektifkan lagi.

	Des'24	Des'23
2. <u>Aktiva Produktif</u> =	$\frac{28.597.996}{36.791.059.977} = 128.64 \%$	$\frac{33.959.324.421}{25.858.604.610} = 131.33\%$
Dana Pihak Ke 3		

Rasio LDR menunjukkan perbaikan sebesar 2.69 % dari posisi Desember tahun 2023, perhitungan LDR ini tidak memasukan komponen simpanan bank lainnya dan pinjaman yang diterima sesuai dengan ketentuan tentang Manajemen risiko, bila di masukan komponen dana pinjaman antar bank dan simpanan antar bank maka rasio LDR adalah sebesar 88.95%.

PROFIL RISIKO DAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT HAYURA ARTALOLA

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SE OJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan OJK No. 3/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

I. PROFIL RISIKO DAN FORMASI TATA KELOLA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PT BPR HAYURA ARTALOLA BANDUNG

Berdasar hasil analisis dan evaluasi tentang Profile Risiko dan Tata Kelola Penerapan Manajemen Risiko pada BPR Hayura Artalola untuk selama semester ke II (Dua) tahun 2024 (Juli sampai dengan Desember 2024) sebagai berikut:

1. Profil Risiko PT BPR Hayura Artalola Kab.Bandung

A. Profil Risiko Kredit

Profile Risiko pengelolaan risiko kredit diperoleh peringkat **risiko 2 (Rendah)** dengan kondisi sama pada profil risiko periode laporan sebelumnya.

Profil risiko ini menunjukkan bahwa BPR Hayura Artalola untuk selama semester II (dua) 2024 (Juli sampai dengan Desember) sebagai berikut:

- a. Aktivitas bisnis yang dilakukan BPR antara lain:
 - Pengelolaan Risiko Kredit, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari *risiko kredit inhern* nilai komposit 2 (dua) tergolong **Rendah** selama periode laporan, Hal-hal yang harus mendapatkan perhatian pada parameter ratio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan 8,09% ada perbaikan dari peride sebelumnya masih diatas standar rata rata 7%, dimana perlu lebih meningkatkan kehati-hatian dalam tahapan pemberian kredit sesuai dengan ketentuan kualitas kredit sesuai POJK No. 01 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, sebagaimana diatur dalam SE OJK Nomor 1 tahun 2019 yaitu pada diatas ambang batas

7%, namun hal ini masih mampu dikendalikan dan tidak berdampak signifikan yang perlu perbaikan data atau pengendalian yang lebih baik.

Karakteristik BPR Hayura Artalola yang termasuk dalam tingkat Risiko Rendah antara lain:

- a) Portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang rendah Ratio Aktiva Produktif terhadap total Aset 95,86%, Ratio KYD terhadap total Asset 85,26%, 25 debitur besar 16,66%, Ratio Kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit 47,67%
- b) Konsentrasi pemberian kredit yang tidak terlalu signifikan;
- c) Pemberian kredit memiliki kualitas kolektibilitas yang baik dengan NPL rata rata 2.38%, pada periode laporan dengan NPL Net 2,33%
- d) Strategi pemberian kredit secara umum relatif stabil; dan
- e) Portofolio pemberian kredit sedikit terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal yaitu terjadinya penurunan daya beli masyarakat.

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit (KPMR) secara komposit **2 (Memadai)**.

Pada periode waktu tertentu KPMR BPR Hayura Artalola untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal dengan indikator antara lain:

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.
- 2) Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.
- 3) Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.
- 4) Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
- 5) SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.

- 6) Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.
- 7) Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit.
- 8) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.
- 9) Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.
- 10) Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.
- 11) Proses penyediaan dana secara umum memadai mulai dari permohonan kredit hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi dual control pada proses kredit berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki.

2. Formasi Penerapan Tata Kelola Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan tata kelola fungsi manajemen risiko kredit periode semester II (Dua) 2024 diperoleh ini komposit 2 dengan **Predikat Memadai**.

- a. Pada Pilar Pengawasan Direksi dan komisaris telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai ketentuan dengan nilai komposit 2 (dua) dengan predikat Memadai, hal yang perlu perbaikan adalah dalam hal melakukan komunikasi kepada seluruh jenjang organisasi terutama di tingkat bawah belum mampu sepenuhnya memahami manajemen risiko kredit yang diterapkan secara keseluruhan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan,
- b. Pada Periode laporan terdapat kekosongan Direksi yang disebabkan meninggal dunianya Direktur Utama pada 24 Mei 2024, namun hal tidak berdampak terlalu signifikan dalam fungsi pengawasan direksi didelegasikan ke direksi lainnya di bawah kontrol dan tanggung jawab langsung komisaris.
- c. Kelemahan pada periode laporan adalah terjadinya kekosongan direksi, direksi berjumlah hanya 1 yang, disebabkan salah satu

direksi meninggal dunia, Pemenuhan pengurus baru sudah diusulkan kepada OJK dan sudah melakukan Fit & Propert sudah mendapatkan persetujuan melalui surat OJK nomor KEP-22/KO.12/2-25, tinggal menung pengesahan dari kementerian hukum.

- d. Pada Pilar Kecukupan Kebijakan Prosedur dan limit risiko, BPR telah memiliki kebijakan dan limit risiko yang memadai sesuai kompleksitas bisnis BPR, namun masih terdapat ketidak sesuaian minor yang tidak signifikan yang perlu perbaikan dalam hal kecukupan sumber daya manusia dan BPR belum sepenuhnya melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan limit risiko kredit dalam hal terjadi perubahan bisnis atau ketentuan perundang-undangan, namun tidak berdampak signifikan.
- e. Pada pilar proses manajemen Risiko dan sistem Informasi manajemen risiko yang memadai, dilakukan secara konsisten didukung dengan sistem informasi manajemen yang cukup, hal yang perlu perbaikan adalah penyempurnaan sistem informasi manajemen, sehubungan dengan terjadinya perubahan regulasi mengenai sistem pelaporan BPR terbaru, yang dipandang memerlukan waktu penyesuaian sistem dan prosedur sesuai dengan kebutuhan yang tepat waktu yang di dukung dengan informasi teknologi yang memadai.
- f. Pada pilar sistem pengendalian intern secara menyeluruh, yang perlu perbaikan adalah pada pertanyaan nomor 12 tentang sistem pengendalian intern yang menyeluruh didapat nilai skor 3, bahwa BPR dalam melakukan proses pengendalian intern belum sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko kredit dan prosedur manajemen risiko kredit terutama yang mempunyai eksposur risiko kredit tinggi. Demikian hanya PE Audit Internal telah melaksanakan fungsi dan tugasnya namun rekomendasi hasil temuannya belum sepenuhnya ditindak lanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keuangan BPR.

B. RISIKO OPERASIONAL

1. Tingkat Risiko Operasional: Peringkat 2,00 (Rendah)

Pada Periode laporan Profil Risiko Operasional BPR Hayura Artalola Peringkat (2) Rendah secara umum karakteristik BPR Hayura Artalola antara lain sebagai berikut:

- a) Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inheren

tergolong sedang selama periode waktu tertentu dan pada masa yang akan datang.

- b) KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) tergolong Cukup Memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
- c) Hal signifikan yang terjadi pada periode pelaporan adalah terjadinya kekosongan salah satu direksi yaitu direktur utama yang meninggal dunia

2. Risiko Intern Operasional : Peringkat 2,00 (Rendah)

Pada periode tertentu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR Hayura Artalola, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko Operasional tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Dengan karakteristik indikator secara umum dalam tingkat Risiko rendah antara lain:

- a) Bisnis BPR berkarakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, dan aksi korporasi kurang signifikan;
- b) Hal Signifikan dalam masalah operasional pada periode laporan terjadinya kekosongan salah satu direksi yaitu direktur utama yang meninggal dunia pada Mei 2024, kekosongan telah didelegasikan ke direksi lainnya,
- c) Kelemahan pada periode laporan adalah terjadinya kekosongan direksi, direksi berjumlah hanya 1 yang, disebabkan salah satu direksi meninggal dunia, Pemenuhan pengurus baru sudah diusulkan kepada OJK dan sudah melakukan Fit & Propert sudah mendapatkan persetujuan melalui surat OJK nomor KEP-22/KO.12/2-25, tinggal menung pengesahan dari kementerian hukum.
- d) SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan;
- e) Teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI;
- f) Frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) rendah dan kerugian tidak signifikan (nihil) dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPR; dan
- g) Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah dan tidak terlalu signifikan.

3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko: Peringkat 3,00 (Cukup Memadai)

KPMR untuk Risiko Operasional cukup memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

Pada Periode Waktu Tertentu karakteristik BPR Hayura Artalola dengan KPMR Memadai dengan indikator antara lain:

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.
- 2) Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.
- 3) Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.
- 4) Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan cukup baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
- 5) Pada Periode laporan terdapat kekosongan Direksi yang disebabkan meninggal dunianya Direktur Utama pada 24 Mei 2024, namun hal tidak berdampak terlalu signifikan dalam fungsi pengawasan direksi didelegasikan ke direksi lainnya di bawah kontrol dan tanggung jawab langsung komisaris.
- 6) Kelemahan pada periode laporan adalah terjadinya kekosongan direksi, direksi berjumlah hanya 1 (satu) orang, disebabkan salah satu direksi meninggal dunia, Pemenuhan pengurus baru sudah diusulkan kepada OJK dan sudah melakukan Fit & Propert sudah mendapatkan persetujuan melalui surat OJK nomor KEP-22/KO.12/2-25, tinggal menung pengesahan dari kementrian hukum.
- 7) SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.
- 8) Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.
- 9) Strategi Risiko Operasional baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional.
- 10) Kebijakan dan prosedur Manajemen operasional serta penetapan limit Risiko operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko operasional,

sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.

- 11) Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.
- 12) Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional.
- 13) Proses operasional secara umum memadai mulai. Fungsi dual control pada proses operasional berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih yang dapat diperbaiki

C. RISIKO KEPATUHAN

1. Tingkat Risiko: Peringkat 2,00 (Rendah)

Pada Periode Laporan Profil Risiko Kepatuhan BPR Hayura Artalola Peringkat **(2) Rendah** secara umum BPR Hayura Artalola berkarakteristik antara lain sebagai berikut:

- a) Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inheren kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
- b) KPMR memadai dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen
- c) Kelemahan pada periode laporan adalah terjadinya kekosongan direksi, direksi berjumlah hanya 1(satu) orang, disebabkan salah satu direksi meninggal dunia, Pemenuhan pengurus baru sudah diusulkan kepada OJK dan sudah melakukan Fit & Propert sudah mendapatkan persetujuan melalui surat OJK nomor KEP-22/KO.12/2-25, tinggal menung pengesahan dari kementerian hukum.
- d) kelemahan hal tidak berdampak terlalu signifikan dalam fungsi pengawasan direksi di delegasikan ke direksi lainnya di bawah kontrol dan tanggung jawab langsung komisaris.

2. Risiko Inheren: Peringkat 2,00 (Rendah)

Pada periode laporan Risiko Inhern Kepatuhan dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR Hayura Artalola, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko Inhern Kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu

pada masa yang akan datang. Dengan karakteristik indikator secara umum antara lain:

- a) Tidak terdapat pelanggaran ketentuan yang signifikan, ketentuan yang belum terpenuhi yaitu terjadi kekosongan Direktur Utama pada periode Laporan yang disebabkan meninggal dunia per Mei 2024;
- b) Rekam jejak kepatuhan BPR baik;
- c) BPR telah menerapkan seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku;
- d) Tidak terdapat proses litigasi pada BPR atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan yang tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan BPR serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPR;
- e) Perjanjian yang dibuat oleh BPR memadai;
- f) Sebagian besar /seluruhnya produk dan aktivitas BPR telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Kelemahan pada periode laporan adalah terjadinya kekosongan direksi, direksi berjumlah hanya 1 yang, disebabkan salah satu direksi meninggal dunia, Pemenuhan pengurus baru sudah diusulkan kepada OJK dan sudah melakukan Fit & Propert sudah mendapatkan persetujuan melalui surat OJK nomor KEP-22/KO.12/2-25, tinggal menung pengesahan dari kementrian hukum.

3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko: Peringkat 2,00 (Memadai)

KPMR untuk Risiko kepatuhan memadai, meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Pada Periode Waktu Tertentu karakteristik BPR Hayura Artalola dengan KPMR Memadai dengan indikator antara lain:

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.
- 2) Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.
- 3) Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.
- 4) Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

- 5) SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.
- 6) Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.
- 7) Strategi Risiko kepatuhan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan.
- 8) Kebijakan dan prosedur Manajemen kepatuhan serta penetapan limit Risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.
- 9) Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.
- 10) Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.
- 11) Proses pelaksanaan kepatuhan secara umum memadai mulai. Fungsi dual control pada proses kepatuhan berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu AHAL atau lebih yang dapat diperbaiki segera.

D. RISIKO LIKUIDITAS

1. Tingkat Risiko Likuiditas: Peringkat 2,00 (Rendah)

Pada Periode tertentu Profil Risiko likuiditas BPR Hayura Artalola Peringkat Rendah secara umum memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a) Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inheren likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR mampu menutup kewajiban jatuh tempo secara tepat waktu.
- b) KPMR memadai dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen, BPR mempunyai reputasi baik untuk memenuhi pendanaan menutup kewajiban jatuh tempo dengan segera baik dari pengaturan arus kas aset produktif maupun sumber pendanaan lainnya.

2. Risiko Inheren Likuiditas: Peringkat 2,00 (Rendah)

Pada periode laporan Risiko Inheren likuiditas dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR Hayura Artalola, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko

Inhern likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Dengan karakteristik indikator secara umum dalam tingkat Risiko rendah antara lain:

- a) Ratio alat likuiditas 14.59% terhadap total asset, Ratio alat likuid terhadap kewajiban lancer 20.18% sedikit diatas ambang batas risk teloran 20%, LDR 129.84%, 25 besar nasabah depositan dan tabungan sebesar 29,28%, ratio pendanaan non inti 14,60% dengan perhitungan tidak memasukan pinjaman antar bank sebagai sumber dana, BPR mampu menutup seluruh kewajiban jatuh tempo baik dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan krisis;
- b) Reputasi BPR baik sehingga memudahkan dalam penggalangan pendanaan antar bank dengan segera;
- c) BPR telah menerapkan seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku;
- d) Tidak terdapat proses litigasi pada BPR atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan yang tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan BPR serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPR;
- e) Perjanjian yang dibuat oleh BPR memadai;
- f) Seluruh produk dan aktivitas BPR telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko: Peringkat 2,00 (Memadai)

KPMR untuk Risiko Likuiditas memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Pada periode waktu tertentu karakteristik BPR Hayura Artalola dengan KPMR Memadai dengan indikator antara lain:

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko likuiditas.
- 2) Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.
- 3) Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.
- 4) Pada Periode laporan terdapat kekosongan Direksi yang disebabkan meninggal dunianya Direktur Utama pada 24 Mei 2024, namun hal tidak berdampak terlalu signifikan dalam fungsi pengawasan direksi didelegasikan ke direksi lainnya di bawah kontrol dan tanggung jawab langsung komisaris.
- 5) Proses pengajuan pengurus atau direksi Baru sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan sudah melakukan Fit And

Propert dengan persetujuan melalui surat OJK nomor KEP-22/KO.12/2025

- 6) Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
- 7) SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.
- 8) Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.
- 9) Strategi Risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas.
- 10) Kebijakan dan prosedur Manajemen likuiditas serta penetapan limit Risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.
- 11) Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.
- 12) Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.
- 13) Proses pelaksanaan likuiditas secara umum memadai mulai. Fungsi dual control pada proses kepatuhan berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih yang dapat diperbaiki

E. TINGKAT KESEHATAN BPR

a. Permodalan (Capital)

Pada Periode Semester II (Juli- Desember 2024)

- 1) Ratio Modal dibanding ATMR sebesar 25.78%
- 2) Ratio Modal inti Terhadap Asset Produktif Bermaslah (APB) ratio 860.42%
- 3) BPR Hayura Artalola memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR. BPR Hayura Artalola termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi sebagian besar dari karakteristik sebagai berikut:
 - a) BPR memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha BPR ke depan;

- b) kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dan dapat cukup menyerap kerugian;
 - c) BPR telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai;
 - d) BPR memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala BPR; dan/atau
 - e) BPR memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik dan memiliki cukup dukungan permodalan dari pemegang saham
- 1) Penilaian Keseluruhan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Hayura Artalola Pada Periode Laporan adalah sebagai berikut:
- 1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola BPR Hayura Artalola telah memadai sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK.
 - 2. Proses tata kelola atas struktur dan infrastruktur telah berjalan dengan efektif dan memadai sesuai ketentuan, namun masih terdapat beberapa temuan minor dalam pemeriksaan OJK hal ini sebagian besar karena human error dan terdapat kekosongan Direktur Utama disebabkan meninggal dunia bulan Mei 2024, sudah dilakukan RUPS pengusulan Pengurus Baru ke OJK dan sudah mendapat persetujuan hasil PKK melalui surat nomor SR 7KO.1222025 tanggal 9 Januari 2025, tugas danggung jawab sementara dilaksanakan oleh Direktur Operasional sampai dengan ada pejabat definitif.
 - 3. Hasil Tata Kelola Laporan transparansi sangat memadai, kepatuhan terhadap peraturan telah dilaksanakan dengan baik dan permasalahan yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan baik.
 - 4. Berdasarkan hasil penilaian sendiri self assessment penerapan tata kelola Semester 2 dua tahun 2024 diperoleh nilai komposit 2,16 dengan peringkat komposit adalah BAIK.

LAPORAN TINGKAT KESEHATAN BANK BPR HAYURA ARTALOLA					
NILAI KOMPOSIT:					
NO	PARAMETER	PENILAIAN POSISI LAPORAN			
		RASIO (%)	SKALA (A)	BOBOT (B)	NILAI FAKTOR (C)=(A)*(B)
1	CAPITAL		1	30	0.30
2	{1} Modal/ATMR	25.76	1		
3	{2} Modal Inti/Aset Prod. Bermasalah	729.31	1		
4	EARNINGS		1	15	0.15
5	ROA	4.92	1		
6	BOPO	80.89	1		
7	NIM	20.39	1		
8	TATA KELOLA		2	30	0.60
9	PROFIL RISIKO		2	25	0.50
10	Total Nilai				1.55
11	Peringkat TKS				2
					SEHAT

No		Penjelasan
1	Kesimpulan Tingkat Kesehatan	Secara Umum BPR Hayura Artalola Tingkat Kesehatan Berpredikat Baik atau (PK2) Mencerminkan Kondisi BPR Secara Umum SEHAT sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercemin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. dalam hal terdapat kelemahan internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
2	Profil Risiko	<p>Profil Risiko BPR Hayura Artalola pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. b. KPMR Memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
3	Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> a) Struktur dan infrastruktur tata kelola struktur dan infrastruktur tata kelola BPR Hayura Artalola telah memadai sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. b) Pada periode pelaporan terjadi kelemahan cukup signifikan yaitu dengan hanya ada 1 direksi yang disebabkan 1 direksi meninggal dunia pada 24 Mei 2024. Pengganti direksi sudah diusulkan dan dilakukan fit and proper pada des 2024, sudah disetujui melalui nomor Surat SR-7/KO.122/2025 Nomor Kep 22/KO.12/2025 c) Proses tata kelola proses tata kelola atas struktur dan infrastruktur telah berjalan dengan efektif, namun masih terdapat beberapa temuan dalam pemeriksaan OJK hal ini sebagian besar karena human error. d) Hasil tata kelola laporan transparansi sangat memadai, kepatuhan terhadap peraturan telah dilaksanakan dengan baik dan permasalahan yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian sendiri self assessment penerapan tata kelola semester II (dua) 2024 diperoleh nilai komposit 2,16 dengan peringkat komposit adalah BAIK.
4	Rentabilitas	<p>Rentabilitas memadai, laba sesuai target RBB, dan mendukung pertumbuhan permodalan. BPR memenuhi seluruh atau sebagian besar berkarakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja BPR Dalam Menghasilkan Laba Sangat Memadai

		<ul style="list-style-type: none"> b. Sumber utama rentabilitas yang berasal dari core earnings sangat dominan. Core earnings mencakup seluruh pendapatan yang bersumber dari aktivitas utama BPR; c. Komponen yang mendukung Core Earnings Stabil; Dan a. Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi.
5	Permodalan	<p>BPR secara kuantitatif memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR. BPR memenuhi sebagian besar karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BPR secara kuantitatif memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha BPR Ke Depan; b. Kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian; c. BPR telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai; d. BPR memiliki manajemen permodalan yang cukup baik memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala bpr e. Namun BPR memiliki keterbatasan terhadap permodalan permodalan dari pemegang saham, dimana modal hanya dibentuk dari pertumbuhan laba organik.

b. Earning

Pada Periode Semester II (Juli- Desember 2024) diukur secara rata - rata selama periode pelaporan

- 1) Ratio ROA 4,92%
- 2) Ratio BOPO 80.86%
- 3) Ratio NIM 20,11%
- 4) BPR Hayura Artalola memiliki Rentabilitas memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. BPR Hayura termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi sebagian besar karakteristik sebagai berikut:
 1. kinerja BPR dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai;
 2. sumber utama rentabilitas yang berasal dari core earnings sangat dominan.

3. Core earnings mencakup seluruh pendapatan yang bersumber dari aktivitas utama BPR; komponen yang mendukung core earnings stabil; dan/atau
 4. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi.
- 5) Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum SEHAT sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
- c. Penilaian sendiri (Self Assempen Penerapatan Tata Kelola Semester II (Dua) tahun 2024 dengan skala penilaian peringkat 2.16 kategori (BAIK)
 - d. Profile risiko untuk 4(empat) risiko yaitu Risiko Kredit, Operasional, Kepatuhan dan Likuiditas memperoleh nilai komposit 2 tingkat risiko **RENDAH** dengan kualitas penerapan manajemen risiko (2) **MEMADAI**

3. KESIMPULAN

1. Profil risiko **Kredit** pada semester II (Dua) tahun 2024 PT. BPR Hayura Artalola dengan laporan profile risiko pada peringkat risiko **2 (Rendah)**, yang masih perlu perbaikan yang bersifat minor pada risiko kredit inhern maupun pada kualitas penerapan manajemen risiko kredit.

Tingkat Risiko Inhern berpredikat **3 (Sedang)** dan Tata Kelola Penerapan Manajemen Risiko Kredit diperoleh predikat **2 (Memadai)** namun masih perlu dilakukan perbaikan, khususnya pada dimensi sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

2. Profil Risiko **Operasional** peringkat **2 (Rendah)**

Tata Kelola Risiko Inhern dan Penerapan Manajemen Risiko Operasional diperoleh predikat 3 (**Cukup Memadai**) namun masih perlu dilakukan perbaikan, khususnya pada dimensi sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

3. Profil Risiko **Kepatuhan** peringkat **2 (Rendah)** yang masih perlu mendapatkan perbaikan adalah penyesuaian atau update peraturan peraturan intern sesuai dengan ketentuan terkini.

Tata Kelola Risiko Inheren berpredikat **2 (Rendah)** dan Penerapan Manajemen Risiko kepatuhan diperoleh predikat **2 (Memadai)** namun masih perlu dilakukan perbaikan, khususnya pada dimensi sistem pengendalian intern yang menyeluruh

4. Profil Risiko **Likuiditas** peringkat **2 (Rendah)** yang masih perlu mendapatkan perbaikan adalah pemenuhan limit risiko secara konsisten diterapkan sesuai dengan karakteristik jatuh tempo sumber dana.

Tata Kelola Risiko Inheren berpredikat **2 (Rendah)** dan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas diperoleh predikat **2 (Memadai)** namun masih perlu dilakukan perbaikan, khususnya pada dimensi sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

5. Profil Risiko BPR Hayura Artalola termasuk dalam peringkat ini secara umum sebagai berikut:
 - a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
 - b. KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
6. Tingkat Kesehatan BPR Pada Periode Semester II 2024 (Juli-Desember) berperingkat PK 2 (Sehat) dengan total Nilai 1.55

Demikian laporan profil risiko dan Tingkat Kesehatan BPR Semester II (Dua) 2024 disampaikan, dan untuk mengetahui secara rinci bahasan tampak pada lampiran surat ini.

Dari resiko-resiko tersebut diatas bisa kita kendalikan apabila penerapan Manajemen Resiko bisa dikelola dengan baik yakni dengan pengawasan yang lebih memadai baik internal maupun external dijalankan dengan baik yakni dengan membuat suatu standar operasioanl dan selalu melakukan pengkinian atas SOP sesuai dengan ketentuan pada setiap bagian sehingga tugas dan tanggung jawab menjadi jelas, penerapan atas SOP berjalan dengan baik , pemantauan pelaksanaan yang berkesinambungan dan evaluasi yang dilakukan sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi bisa di deteksi sedini mungkin, dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan jika diperoleh penyimpangan.

Dalam Rangka menerapkan fungsi kepatuhan BPR telah menunjuk salah satu anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan serta telah mengangkat pejabat eksekutif dalam jabatannya sebagai kepala bagian kepatuhan dan manajemen resiko.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan komisaris dijalankan sesuai ketentuan.

Untuk pengendalian resiko operasional BPR menunjuk atau menetapkan Internal Control yang bertugas melakukan pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan secara berkala dan pelaksanaan penerapan mangemen resiko.

Dalam rangka pengendalian resiko kredit BPR membuat suatu system operasional prosedur perkreditan juga membentuk tim khusus penanganan kredit bermasalah sehingga apabila terjadi permasalahan bisa dengan secepatnya diselesaikan.

PENGELOLAAN BPR DALAM RANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Dalam rangka menjalankan kegiatan operasional sehingga target-target yang telah ditetapkan perusahaan tercapai maka dibuatkan struktur organisasi yang memadai dan penempatan personil sesuai dengan bidang pekerjaannya, Struktur Organisasi terlampir.
- Dalam rangka pemenuhan kewajiban Modal Inti Minimum BPR telah memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum pada tahun 2023 sebesar minimal 6 Milyar.

Modal Inti Minimum posisi Desember 2024 adalah sebesar Rp.6.878.912.325,-

- Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediary BPR berusaha menjalankan fungsinya dengan kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana-dana tersebut dalam bentuk kredit.
- Tahun 2024, BPR telah berusaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah, terutama yang berkaitan dengan Teknologi Informasi yakni dengan penambahan peningkatan program di sistem Core Banking BPR juga telah berkerjasama dengan Faspay untuk proses pelayanan penyetoran melalui Virtual Account secara real time masuk ke rekening nasabah.
- Selain itu, agar dapat memberikan pelayanan yang sama terhadap nasabah dalamantisipasi situasi kondisi bencana yang tak terduga, BPR telah bekerjasama dengan vendor PT. Sinergi Prakarsa Utama perihal *Disaster Recovery Center*. Kapasitas ruang DRC tersebut berada di luar wilayah kerja BPR lengkap dengan sarana pendukung, pengembangan system percepatan proses pelayanan M-Collection serta kerjasama Faspay layanan Virtual Account yang bisa diakses dari berbagai bank umum, Alfa Mart, Indomart dan lainnya secara real time, percepatan proses perkreditan melalui LOS (Loan Origination System), Aplikasi Traker untuk marketing, Aplikasi Dask Board untuk Approval
- Perkembangan perusahaan yang terus menunjukkan perbaikan, dikarenakan BPR melakukan pendekatan yang persuasif kepada sumber-sumber informasi yang bisa dijadikan sarana promosi, dengan target market hampir 80 % kepada para pengusaha mikro yang berada diwilayah jaringan kantor BPR.

- Jaringan wilayah kerja disamping kantor pusat BPR mempunyai 2 (kantor) kantor kas yang berada di Soreang yang mencakup 4 (empat) wilayah operasional yang terdiri dari 8 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Soreang, Banjaran, Pamengpeuk, Katapang, Kutawaringin, Lembang, Sindangkerta dan Kecamatan Naringgul.
- Kerjasama yang terus dijalin antara BPR dengan bank lain diantaranya dengan Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya maupun BPR- BPR lain sebagai alternatif sumber dana yang produktif dan terukur , disamping sumber dana dari pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito.
- Kerjasama dengan lembaga lainnya yakni PT Komunal dalam proses pemasaran Deposito secara Digital dengan menggunakan Platform Komunal sebagai agen pemsarannya.
- Komposisi SDM tahun 2024 dengan proporsi terbesar dengan tingkat pendidikan SLTA (63%) sedangkan proporsi terkecil adalah karyawan dengan tingkat pendidikan S1 (14%). Uraian lebih lanjut, termasuk perbandingan dengan periode yang sama tahun lalu, adalah sebagai berikut:

Pendidikan	Desember 204		Desember 2023	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
S1	10	14%	7	17%
D3	7	23%	11	26%
SLTA Plus	26	63%	24	57%
Keseluruhan	43	100.00%	42	100.00%

- Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam upaya meningkatkan skill dan kemampuan para karyawanya di tahun 2024 telah diikutsertakan karyawan dalam berbagai kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Perbarindo maupun In house Training.
- Tahun 2024 melakukan pencadangan Dana Pendidikan sebesar Rp. 3% dari BTK tahun lalu, realisasi Pendidikan dan pelatihan tetap dilakukan dimana dengan Beban Pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 42.427.- ribu

Jenis pelatihan dan jenis pendidikan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM SOSIALISASI DAN PELATIHAN	BAGIAN	Tanggal PELAKSANAAN
	Sosialisasi:	Pemateri	
1	POJK Nomor 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR	PE Kepatuhan PKMR	21/03/2024
2	POJK Nomor 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR	Dir Kepatuhan dan Komisaris	05/03/2024
3	Training Implementasi Pelaporan	PE PKMR dan Kabag SDM	26/04/2024
4	Training Capacity Building Keshalehan Sosial	Kabag Supervisi dan Korwil	04/05/2024
5	Sertifikasi Direktur Survailen	PE Kabag Marketing	15/05/2024
6	Training Penanganan Gugatan Sederhana	Koordinator Wilayah 2 Orang	04/06/2024
7	Penerapan APU PPT dan PPSM	PKMR	11/06/2024
8	Sosialisasi Penerapan CKPN	Direktur dan Komisaris	21/06/2024
	PELATIHAN	PESERTA	
1	Workshop APU PPT dan PPSM	Seluruh Karyawan	27/07/2024
2	Capacity Building	Direktur utama dan Komisaris	22/08/2024
3	Uji Kompetensi SDM	Analisis Kredit Dan Staf Kredit	28/08/2024
4	Strategi Anti Fraud	PKMR	05/09/2024
5	Banker Karakter Building	Staf Umum dan Korwil	08/10/2024
6	Training SAK EP dan Penerapan CKPN	Seluruh Karyawan	28/12/2024

- Penyempurnaan Standar Operasional Prosedure (SOP) Kredit, Kepegawaian dan Operasional Umum dan pelaksanaan serta pengawasan secara berkesinambungan atas penerapan SOP sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik.
- Penerapan atas pelaksanaan sosialisasi ketentuan dilakukan pada SIM portal atau Forum BPR Hayura, pelaksanaan sosialisasi ketentuan sebagai upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan serta permintaan Otoritas Jasa Keuangan kepada Management BPR untuk memberikan perhatian khusus dalam hal peningkatan internal risk culture dan risk awarness sebagai salah satu strategi penguatan fungsi manajemen risiko dan internal control, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan prosedure.
- Jumlah gaji , honor dan fasilitas lain yang dibayarkan kepada Direksi, Komisaris dan pihak-pihak lainnya adalah sebesar Rp. 4.719.347.686,- ribu pada tahun 2024 dan Rp. 4.709.639.917 pada tahun 2023.
- Kebijakan pemberian gaji, bonus kepada Direksi sepenuhnya dilakukan oleh RUPS sedangkan pemberian fasilitas lainnya berupa Tunjangan Hari Raya (THR)

disetujui pada saat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran, dengan jumlah THR yang disetujui sebanyak 2 (dua) kali gaji.

Analisa Produktifitas dan Keterjangkauan

Produktivitas karyawan baik terhadap penggalangan dana maupun pengelolaan kredit dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Simpanan}}{\text{SDM}} = \frac{28,597,995,975}{43 \text{ Orang}} = 665.069 \text{ ribu}$$

Setiap karyawan mampu menghimpun dana tabungan dan deposito rata-rata sebesar Rp. 665,069,84 ribu.

$$\frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{SDM}} = \frac{36,791,059,977}{43 \text{ Orang}}$$

Setiap karyawan mampu mengelola kredit rata-rata sebesar Rp.855,606,045.98. Untuk mengetahui keterjangkauan Sumber Daya Manusia dalam mengelola nasabah baik dana maupun kredit dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penyimpan}}{\text{SDM}} = \frac{8.744 \text{ Orang}}{43 \text{ Orang}}$$

Tiap orang karyawan menangani 203 orang penyimpan .

$$\frac{\text{Jumlah Debitur}}{\text{SDM}} = \frac{2.512 \text{ Orang}}{43 \text{ Orang}}$$

Tiap 1 (satu) orang karyawan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur rata-rata sebanyak 58 orang.

Jika kita analisa rasio-rasio tersebut diatas dengan SDM sebanyak 43 orang BPR mampu mencapai tingkat perkembangan yang cukup baik, namun dengan semakin bertambahnya jumlah penyimpan maupun peminjam juga seiring dengan bertambahnya volume usaha yang senantiasa memerlukan pengawasan maka perusahaan terus melakukan rekrutment pegawai sesuai dengan kebutuhan.

**PENILAIAN ASPEK ASPEK TATA KELOLA DI BPR HAYURA
ARTALOLA
SEMESTER II TAHUN 2024**

I. ASPEK PEMEGANG SAHAM			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Pemegang saham terdiri PSP dan Pemegang Saham lainnya telah sesuai persyaratan dan perundang-undangan
2.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputus melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	2	Kebijakan dan tata cara pengambil keputusan selalu melalui RUPS yang tidak melanggar aturan di atasnya.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisari	2	Para pemegang saham belum sepenuhnya melakukan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR dan kebijakan strategis lainnya kepada Direksi dan Dewan komisaris
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	2	Pemegang saham terkadang melakukan pemantauan terhadap sebagian besar perkembangan BPR melalui hasil pengawasan komisaris, sebagaimana tertuang dalam laporan Dekom secara berkala melalui RUPS sesuai ketentuan
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	3	Pemegang saham cukup melakukan dukungan perkembangan BPR rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar cukup terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	3	Pemegang saham cukup memastikan penerapan tata kelola yang sehat, dengan senantiasa meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, intervensi dan melakukan keputusan melalui RUPS tentang pengangkatan, pergantian Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	2	Sebagian besar pengambilan keputusan yang diambil melalui RUPS senantiasa memperhatikan masukan, rekomendasi dari pemegang saham dan dewan komisaris
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	2	Setiap Pemegang saham selalu di perlakukan secara adil dalam pemberian deviden dan hak suaranya.

9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	2	Kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis khususnya tentang pemenuhan permodalan.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	3	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan dan intervensi kepada pengurus yang dapat mengurangi keuntungan BPR dan mempengaruhi kelangsungan bisnis BPR.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	2	Pembagian dividen dilakukan telah sesuai anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kesimpulan Faktor Pemegang Saham:			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
		Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan dalam struktur penerapan tata kelola
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak terlalu signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Faktor Negatif	Terdapat keterbatasan terhadap akses permodalan, dan pemenuhan kewajiban apabila secara darurat diperlukan dana tambahan dari pemegang saham
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	sebagian besar proses pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Faktor Negatif	Pada periode pelaporan masih adanya temuan pemeriksaan OJK adanya kelemahan dalam potensi terjadinya benturan kepentingan, yang mana hal tersebut dapat diselesaikan melalui perbaikan ketentuan dan prosedur.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	2	Jumlah direksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, namun terdapat kelemahan pada periode mulai Bulan Mei 2024 terjadinya kekosongan salah satu direksi yaitu direktur utama akibat meninggal dunia, sudah dilakukan proses pergantian pengurus baru, sudah ada persetujuan rekomendasi hasil PKK dari OJK
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Seluruh anggota direksi bertempat tinggal yang sama dengan wilayah kantor pusat BPR yaitu di Kabupaten Bandung, sesuai dengan ketentuan
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Seluruh anggota direksi tidak sedang merangkap jabatan pada bank lain, LJK, perusahaan dan atau lembaga lainnya sesuai ketentuan OJK
4.	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	2	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan hasil penilaian OJK yang tertuang dalam surat rekomendasi hasil PKK untuk Direksi
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	2	Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	2	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi (Piagam Direksi) sesuai POJK.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	2	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan / atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan

9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	2	Direksi cukup memiliki kompetensi sesuai POJK, serta memiliki kemauan untuk meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran secara berkelanjutan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	2	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum.
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	3	Direksi belum secara optimal penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit Internal dan Eksternal serta masukan hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan OJK.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	2	Pengambilan keputusan Direksi selalu ber-pedoman dan tata tertib kerja (Piagam Direksi) yang disusun dan ditetapkan Direksi.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	2	Kebijakan dan keputusan strategis yang dibuat direksi selalu memper- timbangkan masukan dari Dekom dan diputuskan dalam rapat Direksi.
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain dan tidak menerima remunerasi diluar yang telah ditetapkan RUPS.
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	2	Direksi cukup optimal membudayakan pembelajaran berke lanjutan dalam peningkatan pengetahuan perbankan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non elektronik yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	2	Direksi telah mengungkapkan tentang kepemilikan saham, dan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan pengurus dan pemegang saham BPR.
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	2	Direksi telah mengungkapkan tentang kepemilikan saham, dan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan pengurus dan pemegang saham BPR.
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	2	Anggota Direksi telah mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplemen-tasikan kompeten
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	2	Direksi selalu melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja direksi.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	2	Direksi selalu mengevaluasi setiap tahun kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	3	Direksi telah melaksanakan tugas dan mempertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	3	Seluruh pegawai cukup mengetahui dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR secara teknis operasional.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	2	Keputusan Direksi mengikat bagi semua direksi sebagai dasar pengambilan keputusan.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	2	Hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumen tasikan dengan baik.
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	3	Terdapat cukup peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan BPR.
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	2	Direksi selalu menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sesuai POJK.

2. Kesimpulan Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun, Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik
		Faktor Negatif	Terdapat kekosongan salah satu direksi yaitu pada bulan Mei 2024 dirut meninggal dunia fungsi dan tugas dilaksanakan oleh direksi lainnya
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Proses pelaksanaan realisasi Rencana bisnis BPR yang telah disusun dijadikan pedoman dan dasar setiap pengambilan kebijakan dan strategi yang diambil yang cukup didukung oleh direksi.
		Faktor Negatif	Dalam proses realisasi RBB terkadang kurang konsisten menjadikan RBB sebagai pedoman pencapaian target yang ditentukan, terutama apabila terjadinya perubahan situasi kondisi internal dan eksternal.
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan fungsi dan tugasnya secara baik melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif, kinerja perusahaan sebagian besar terlaksana sesuai dengan RBB
		Faktor Negatif	Masih terdapat temuan temuan yang bersifat administratif, independensi direksi dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya yang perlu dilakukan evaluasi secara berkala.

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	2	Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK.
2.	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Wilayah tempat tinggal anggota salah satu Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK.
3.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja (Piagam Dewan Komisaris) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris sesuai POK.
4.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	2	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai POJK.
5.	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham yang sesuai POJK.
6.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	3	Seluruh Komisaris Independen tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi sesuai ketentuan POJK, akan tetapi salah satu anggota komisaris memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham yaitu H. Mutiq Yusmita Hadyat dan Pemegang Saham Hj. Gusti Nurmahrta sebagai anak dan ibu.
7.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	2	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan POJK, dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.
8.	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris sudah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			

9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan / atau keputusan RUPS.	3	Dewan Komisaris belum secara optimal melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang tetapi selalu prinsip kehati-hatian, dan tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	3	Dewan Komisaris belum secara optimal mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali yang ditetapkan dalam POJK.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris cukup memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal atau hasil pengawasan Dekom melalui laporan dari auditor internal tentang Laporan Audit Tindak Lanjut.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	2	Dewan Komisaris terkadang meminta Direksi untuk memberikan penjelasan permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR melalui rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	3	Dewan Komisaris telah menyusun, menetapkan dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara cukup konsisten.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	2	Salah satu anggota Dewan Komisaris telah menyediakan waktu min 3 hari dalam setiap minggu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris selalu menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.

17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris cukup menghindari terjadi benturan kepentingan untuk pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain maupun menerima remunerasi yang tidak sesuai dengan kebijakan keputusan RUPS
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	3	Anggota Dewan Komisaris selalu melakukan pengawasan tidak langsung melalui hasil Laporan Tindak Lanjut dari Auditor Internal tentang realisasi tugas Direksi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris tidak mengajukan kepada RUPS, untuk usulan pembentukan komite yang membantu komisaris sebab modal inti di bawah Rp 50 M
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris tidak memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite, sebab BPR tidak membentuk komite yang membantu dewan komisaris. sebab modal inti di bawah Rp 50 M
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris secara berkala belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	2	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dan informasikan kepada Dewan Komisaris.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	2	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai prinsip keadilan dan kewajaran.
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	3	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK seperti Laporan Pengawasan Realisasi RBB, dan Laporan khusus bila terjadi penyimpangan yang membahayakan kelangsungan BPR.

26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat cukup memadai peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR
----	---	---	---

3. Kesimpulan Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan
		Faktor Negatif	Salah satu anggota dewan komisaris memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pemegang saham, namun tidak berdampak signifikan pengaruhnya terhadap setiap proses pengambilan keputusan dalam RUPS
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS
		Faktor Negatif	Potensi akan terjadinya benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan melalui RUPS
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Hasil Pencapaian Rencana bisnis hampir seluruhnya dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
		Faktor Negatif	Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh dari realisasi hasil-hasil realiasi RBB di semua faktor dan indikator kinerja, untuk perbaikan kedepan

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah membentuk Komite Direksi seperti Komite Kredit dan tidak membentuk Komite Dewan Komisaris sebab modal inti di bawah Rp 50 M.
2.	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR belum memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit (Piagam Komite Kredit)
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	1	Direksi tidak membentuk Komite Manajemen Risiko, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga BPR cukup penunjuk PE Fungsi Manajemen Risiko
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	1	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Audit, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga Tugas dan tanggung Komite Audit dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	1	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Pemantau Risiko, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga Tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	1	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga Tugas dan tanggung jawabnya Komite ini dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	1	BPR tidak membentuk Komite Manajemen Risiko dan Komite Dewan Komisaris, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK
8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	1	BPR tidak membentuk Komite Manajemen Risiko dan Komite Dewan Komisaris, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga tidak ada pedoman dan tata tertib kerja komite.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	2	Komite Kredit selalu menerima masukan dari PE Fungsi Manajemen Risiko kepada komite kredit (sesuai ambang batas) sebagai pertimbangan komite kredit dalam melakukan kredit review dan atau pertimbangan untuk keputusan kredit sesuai Batas Wewenang Kredit (BWK).
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	1	Komite Dewan Komisaris tidak dibentuk , sebab BPR Modal Inti di bawah Rp 50 M sehingga tidak ada pemberian rekomendasi komite audit intern, fungsi manajemen risiko, serta komite remunerasi dan nominasi
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	1	Tidak ada hasil rapat komite dewan komisaris untuk dituangkan dalam risalah rapat, disebabkan tidak membentuk.

4. Kesimpulan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Direksi tidak membentuk Komite Manajemen Risiko, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga BPR cukup penunjuk PE Fungsi Manajemen Risiko
		Faktor Negatif	BPR tidak wajib membentuk komite
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Komite Kredit selalu menerima masukan dari PE Fungsi Manajemen Risiko kepada komite kredit (sesuai ambang batas) sebagai pertimbangan komite kredit dalam melakukan kredit review dan atau pertimbangan untuk keputusan kredit sesuai Batas Wewenang Kredit (BWK).
		Faktor Negatif	BPR tidak wajib membentuk komite
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Komite Dewan Komisaris tidak dibentuk, sebab BPR Modal Inti di bawah Rp 50 M sehingga tidak ada pemberian rekomendasi komite audit intern, fungsi manajemen risiko, serta komite remunerasi dan nominasi, sehingga belum ada outcome
		Faktor Negatif	BPR tidak wajib membentuk komite

5. Penanganan Benturan Kepentingan			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	2	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	2	Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai diungkap secara transparan melalui laporan penerapan tata kelola BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	2	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai senantiasa menghindarkan diri dari segala bentuk/potensi benturan kepentingan yang didukung dengan fakta integritas dari semua pihak terkait.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan serta didokumentasikan walaupun sampai saat ini belum terjadi.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	2	BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, karena sampai saat waktu laporan ini belum terjadi,

5. Kesimpulan Penanganan Benturan Kepentingan			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.
		Faktor Negatif	pedoman dan kebijakan perlu dilakukan evaluasi secara berkala seperti ketentuan mengenai penunjukan penanggung jawab penanganan benturan kepentingan di setiap unit kerja
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Proses pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di setiap unit kerja dan seluruh aspek bisnis telah dilakukan dengan cukup baik
		Faktor Negatif	Proses pelaksanaan penanganan benturan kepentingan belum sepenuhnya dilaksanakan di setiap unit kerja dan level jabatan secara konsisten
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Hasil penerapan dan penanganan benturan kepentingan berhasil cukup baik, tidak terjadinya benturan kepentingan yang signifikan yang dapat mempengaruhi laba dan berdampak terhadap kerugian BPR
		Faktor Negatif	Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terhadap penanganan benturan di setiap unit kerja

6. Penerapan Fungsi kepatuhan			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan telah sesuai POJK.
2.	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
3.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
4.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	3	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunankebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui penyusunan kebijakan kepatuhan sejalan dengab visi dan misi BPR.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dilakukan PE Kepatuhan telah cukup mampu memastikan kegiatan usaha BPR sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan cukup mampu melakukan tugas dan tanggung jawab
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil cukup mampu menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai POJK.

6. Kesimpulan Penerapan Fungsi kepatuhan			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik
		Faktor Negatif	Selama periode pelaporan terjadi kekosongan salah satu direksi yaitu direktur utama, sesuai dengan fungsi dan tugasnya dilaksanakan oleh direksi yang membawahi kepatuhan, sehingga fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh PE Kepatuhan dan manajemen risiko
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh PE Kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.
		Faktor Negatif	Dengan terjadinya kekosongan salah satu direksi yaitu direktur utama menyebabkan penerapan kontrol fungsi kepatuhan dirasa kurang optimal, karena direksi yang membawahi fungsi kepatuhan menjabat sebagai direksi bisnis
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	hasil penerapan tata kelola sesuai dengan prinsip prinsip tata kelola dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.
		Faktor Negatif	Belum sepenuhnya penerapan kepatuhan pada seluruh aspek bisnis, dan dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap setiap aspek usaha

7. Penerapan Fungsi Audit Intern			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah memiliki / menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai POJK.
2.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	3	BPR telah melaksanakan PE fungsi audit intern yang disertai memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja (Piagam Audit) sesuai POJK.
3.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	2	PE Audit Intern dalam melaksanakan fungsi audit intern telah mampu melaksanakan secara independen terhadap fungsi operasional.
4.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	2	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah cukup mampu bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
5.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	2	BPR telah menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai sebagai Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan audit intern secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern sesuai POJK.
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tentang hasil kerja satuan kerja audit intern, disebabkan BPR modal inti di bawah Rp 50 M.
8	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR belum secara optimal melakukan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan, kecuali hanya sebatas laporan hasil audit.
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	2	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan tentag Pokok Hasil Audit setiap awal bulan Januari tahun berikutnya.

7. Kesimpulan Penerapan Fungsi Audit Intern			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan
		Faktor Negatif	PE yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pelaksana fungsi audit intern, mengalami kondisi sakit yang sedikit mengganggu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal, namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PE audit intern berjalan dengan cukup baik serta hasil kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
		Faktor Negatif	Ruang lingkup objek pemeriksaan PE audit internal terkendala kondisi kesehatan pejabat PE, namun hal tersebut dapat di bantu oleh staf supervisi lainnya khususnya dalam audit pengawasan kredit
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama secara cukup baik dan penyampaian laporan dilakukan secara cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, cakupan hasil pemeriksaan LHP mencerminkan sebagian besar objek auditi, temuan temuan relatif dapat di selesaikan pada aktifitas bisnis normal, tidak terdapat temuan yang signifikan dapat mempengaruhi risiko operasional, kredit, likuiditas dan kepatuhan
		Faktor Negatif	Cakupan hasil pemeriksaan audit internal belum menggambarkan secara utu permasalahan di setiap unit kerja yang berpotensi terjadinya risiko tinggi terhadap risiko kredit, risiko operasional, kepatuhan dan likuiditas sebagai bahan perbaikan kedepan.

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktif	Keterangan
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	2	pelaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan, telah dilakukan BPR secara tepat waktu sesuai ketentuan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	2	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah cukup baik.

8. Kesimpulan Penerapan Fungsi Audit Ekstern			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan dalam struktur pelaksanaan penugasan audit eksternal
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Proses audit eksternal telah sesuai dengan cakupan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK.
		Faktor Negatif	Dalam proses pelaksanaan audit eksternal, baru tercermin sebagian kecil permasalahan yang di hadapi BPR
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Hasil audit Akuntan Publik (KAP) dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, serta hasil audit menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.
		Faktor Negatif	Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh dari hasil pemeriksaan KAP pada periode pemeriksaan untuk perbaikan kedepannya

9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR memenuhi persyaratan terkait dengan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam POJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik, sesuai dengan ketentuan modal, BPR tidak wajib membentuk Komite dan Satuan Kerja, pelaksana fungsi komite dan satuan kerja dilaksanakan oleh Pejabat eksekutif, yaitu Sdr. Tito Tinarsa, SE.
2.	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, sesuai dengan ketentuan terbaru, melakukan penetapan limit risiko risk teloran dan risk appetite
3.	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	3	BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab, terhadap fungsi manajemen resiko, fungsi anti fraud, penerapan program APU dan PPT telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko, melakukan evaluasi, mmenerapkan batas limit BWK atas persetujuan transaksi di setiap level. melalukukan kebijakan terhadap manajemen resiko dengan baik. Dan memastikan penerapan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan anti fraud dan program APU PPT

6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	2	Dewan Komisaris menyetujui terhadap pedoman dan kebijakan manajemen risiko, serta melakukan evaluasi pertanggung jawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, melakukan pengawasan secara cukup aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	3	BPR telah melakukan sebagian besar atas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, dengan cukup baik
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	3	sebagian besar dalam melaksanakan tugas, BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan cukup baik.
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik.
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan strategi anti fraud secara cukup efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dengan cukup baik.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan datadan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yan cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh.
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah melakukan dengan cukup baik dalam pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	2	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR secara umum telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada periode laporan tidak terdapat produk atau aktifitas baru yang dilaporkan kepada OJK.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	3	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin sesuai ketentuan serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, pada periode laporan belum ada kewajiban pelaporan

9. Kesimpulan Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	BPR Hayura Artalola telah memenuhi persyaratan terkait dengan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik.
		Faktor Negatif	Sehubungan dengan terjadinya perubahan struktur organisasi BPR, mulai dari pengurus, sehingga terjadinya rotasi dan mutasi terutama di jajaran Pejabat Eksekutif memerlukan pembinaan dan peningkatan pengetahuan Pejabat Eksekutif
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Proses pelaksanaan manajemen risiko, dan penerapan strategi anti fraud berjalan baik sesuai dengan sifat dan kondisi pemilik risiko dapat di indentifikasi dan di mitigasi secara baik.
		Faktor Negatif	Dalam proses realisasi penerpapan manajemen risiko dan strategi anti fraud pelaksanaannya kadang kurang konsisten pada tahapan mitigasi dan pemantauan, baik pada manajemen risiko kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas.
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Pada periode laporan secara umum untuk profile risiko kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas tergolong rendah, dengan kualitas penerapan manajemen risiko memadai, tidak terjadinya fraud
		Faktor Negatif	Masih terdapat kelemahan dalam pengendalian risiko inhern operasional pada periode laporan sehubungan terjadinya kekosongan salah satu direksi akibat meninggal dunia, sehinga fungsi dan tugasnya dilaksanakan oleh direksi lainnya, perlu peningkatan pencegahan pemantauan potensi terjadinya fraud

10. Batas Maksimum Pemberian Kredit			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2	BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			

2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar, telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan cukup memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Kesimpulan Penerapan BMPK			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR
		Faktor Negatif	Pedoman dan kebijakan ketentuan BMPK yang di buat BPR belum sepenuhnya mengatur dan memperhatikan profile debitur khususnya yang masuk dalam pihak terkait, terutama kriteria pengecualian dari ketentuan BMPK
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan cukup memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit.
		Faktor Negatif	Dalam proses pemberian kredit meskipun sudah memperhatikan ketentuan BMPK, namun masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian terutama dalam mengukur profile debitur khususnya debitur debitur besar, seperti memperhatikan kemampuan bayar, dan sumber pembayaran, termasuk pada pihak terkait
	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, pelaporan BMPK dilaksanakan sesuai ketentuan
		Faktor Negatif	Masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip kehati hatian terutama terhadap pinjaman pinjaman besar dan pihak terkait yang perlu terus dilakukan evaluasi dan perbaikan

11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	2	BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	2	BPR sebagian besar sudah memiliki pelaporan internal dan eksternal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	3	BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur
B. Proses Penerapan Tata Kelola(P)			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	2	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah cukup baik menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah baik dalam melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sebagian besar, BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan cukup baik

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	2	Secara keseluruhan BPR tidak terdapat penyalahgunaan, pemanfaatan, rekayasa hukum untuk kepentingan BPR dan atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	2	Pada periode laporan tidak terdapat pengaduan konsumen yang signifikan, penanganan pengaduan ditangani secara memadai, laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan telah dilaporkan secara tepat waktu.

11. Kesimpulan Penerapan Integritas Pelaporan			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
		Faktor Negatif	Sehubungan dengan terjadinya perubahan struktur data pelaporan ke pihak regulasi seperti pemberlakuan SAK EP, perlu dilakukan penyesuaian penyesuaian Struktur dan infrastruktur, BPR belum sepenuhnya mampu melakukan penyesuaian struktur dan infrastruktur sistem dan informasi sepenuhnya dalam waktu yang cukup singkat.
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	BPR memiliki pelaporan internal dan eksternal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum
		Faktor Negatif	Dalam proses realisasi system dan informasi terkadang masih terjadinya error system, yang disebabkan terjadinya penyesuaian system akibat penyesuaian dengan aturan regulasi, namun kurang berdampak signifikan terhadap proses layanan operasional, dan hal tersebut dapat teratasi segesar dalam proses bisnis normal
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah
		Faktor Negatif	Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh dari realisasi sistem informasi pelaporan yang ada, sehubungan terjadinya perubahan perubahan regulasi yang cukup signifikan di tahun laporan

12. Rencana Bisnis BPR			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR cukup baik menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Rencana bisnis BPR cukup didukung oleh pemegang saham, diantaranya memperkuat permodalan dari pertumbuhan laba, infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR disusun secara cukup realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan komisaris sebagian besar melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis sudah dilakukan dengan baik, rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	2	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan sudah dilakukan dengan baik, dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

12. Kesimpulan Rencana Bisnis Bank			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Rencana bisnis BPR Hayura Artalola sebagian besar telah disusun secara realistis, cukup komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta cukup menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.
		Faktor Negatif	Rencana bisnis, belum secara jelas menggambarkan dukungan rencana strategis pemegang saham dalam penguatan permodalan BPR, yang selama ini hanya tumbuh dari pemupukan pertumbuhan laba BPR
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Prosesn pelaksanaan realisasi Rencana bisnis BPR yang telah disusun dijadikan pedoman dan dasar setiap pengambilan kebijakan dan strategi yang diambil yang didukung oleh pemegang saham.
		Faktor Negatif	Dalam proses realisasi RBB terkadang kurang konsisten menjadikan RBB sebagai pedoman pencapaian target yang ditentukan, terutama apabila terjadinya perubahan perubahan situasi kondisi internal dan eksternal.
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Hasil Pencapaian Rencana bisnis hampir seluruhnya dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
		Faktor Negatif	Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh dari realisasi hasil-hasil realiasi RBB di semua faktor dan indikator kinerja, untuk perbaikan kedepan

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR HAYURA ARTALOLA

Nama BPR : HAYURA ARTALOLA

Posisi : 30 Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	2.27	2.14	2.31	1.36	2.00	2.44	2.27	2.00	2.35	2.20	2.25	2.29	2.16
Predikat Komposit	BAIK												

Kesimpulan Akhir

Manajemen BPR Hayura Artalola telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **BAIK**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Faktor Positif

Rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

A. Struktur

- 1) Struktur **pemegang saham** memenuhi seluruh ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- 2) **Direksi** memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik, Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik
- 3) **Dewan Komisaris** memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan
- 4) Direksi tidak membentuk **Komite** Manajemen Risiko, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga BPR cukup penunjuk PE Fungsi Manajemen Risiko
- 5) BPR telah memiliki dan menginginkan kebijakan **benturan kepentingan** dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan
- 6) Anggota Direksi yang membawahkan **fungsi kepatuhan** memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik
- 7) Pejabat Eksekutif yang melaksanakan **fungsi audit intern** memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan
- 8) Penugasan **audit eksternal** kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 9) BPR Hayura Artalola telah memenuhi persyaratan terkait dengan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk strategi anti fraud, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik
- 10) BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginginkan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR
- 11) BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu Rencana bisnis BPR Hayura Artalola sebagian besar telah disusun secara realistis, cukup komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta cukup menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan

B. Proses

- 1) Pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak terlalu signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 2) Proses pelaksanaan realisasi Rencana bisnis BPR yang telah disusun dijadikan pedoman dan dasar setiap pengambilan kebijakan dan strategi yang diambil yang cukup didukung oleh pemegang saham.
- 3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS
- 4) Komite Kredit selalu menerima masukan dari PE Fungsi Manajemen Risiko kepada komite kredit (sesuai ambang batas) sebagai pertimbangan komite kredit dalam melakukan kredit review dan atau pertimbangan untuk keputusan kredit sesuai Batas Wewenang Kredit (BWK).
- 5) Proses pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di setiap unit kerja dan seluruh aspek bisnis telah dilakukan dengan cukup baik
- 6) Pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh PE Kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.
- 7) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PE audit intern berjalan dengan cukup baik serta hasil kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara cukup lengkap, akurat, utuh, dan tepat waktu.
- 8) Proses pelaksanaan audit eksternal sesuai dengan cakupan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK
- 9) Proses pelaksanaan manajemen risiko, dan penerapan strategi anti fraud berjalan baik sesuai dengan sifat dan kondisi pemilik risiko dapat diidentifikasi dan di mitigasi secara baik.
- 10) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan cukup memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit
- 11) BPR memiliki pelaporan internal dan eksternal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum
- 12) Proses pelaksanaan realisasi Rencana bisnis BPR yang telah disusun dijadikan pedoman dan dasar setiap pengambilan kebijakan dan strategi yang diambil yang didukung oleh pemegang saham.

C. Hasil

- 1) Sebagian besar proses pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan fungsi dan tugasnya secara baik melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif, kinerja perusahaan sebagian besar terlaksana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- 3) Hasil Pencapaian Rencana bisnis hampir seluruhnya dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, utuh, dan tepat waktu.
- 4) Komite Dewan Komisaris tidak dibentuk, sebab BPR Modal Inti di bawah Rp 50 M sehingga tidak ada pemberian rekomendasi komite audit intern, fungsi manajemen risiko, serta komite remunerasi dan nominasi, sehingga belum ada outcome
- 5) Hasil penerapan dan penanganan benturan kepentingan berhasil cukup baik, tidak terjadinya benturan kepentingan yang signifikan yang dapat mempengaruhi laba dan berdampak terhadap kerugian BPR
- 6) Hasil penerapan tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola dan sesuai dengan ketentuan peraturan

<ul style="list-style-type: none"> 7) perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja 7) Hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama secara cukup baik dan penyampaian laporan dilakukan secara cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, cakupan hasil pemeriksaan LHP mencerminkan sebagian besar objek auditi, temuan temuan relatif dapat diselesaikan pada aktifitas bisnis normal, tidak terdapat temuan yang signifikan dapat mempengaruhi risiko operasional, kredit, likuiditas dan kepatuhan 8) Hasil audit Akuntan Publik (KAP) dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, serta hasil audit menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR 9) Pada periode laporan secara umum untuk profile risiko kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas tergolong rendah, dengan kualitas penerapan manajemen risiko memadai, tidak terjadinya fraud 10) Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, pelaporan BMPK dilaksanakan sesuai ketentuan 11) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah 12) Hasil Pencapaian Rencana bisnis hampir seluruhnya dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
--

Faktor Negatif

Rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

A. Struktur

- 1) Kemampuan pemenuhan penguatan permodalan sedikit terbatas
- 2) Terdapat kekosongan salah satu direksi yaitu pada bulan Mei 2024 dirut meninggal dunia fungsi dan tugas dilaksanakan oleh direksi lainnya
- 3) Salah satu anggota dewan komisaris memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pemegang saham, namun tidak berdampak signifikan pengaruhnya terhadap setiap proses pengambilan keputusan dalam RUPS
- 4) BPR tidak wajib membentuk komite datau satuankerja
- 5) Pedoman dan kebijakan perlu dilakukan evaluasi secara berkala seperti ketentuan mengenai penunjukan penanggung jawab penanganan benturan kepentingan di setiap unit kerja
- 6) Selama periode pelaporan terjadi kekosongan salah satu direksi yaitu direktur utama, sesuai dengan fungsi dan tugasnya dilaksanakan oleh direksi yang membawahi kepatuhan, sehingga fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh PE Kepatuhan dan manajemen risiko
- 7) PE yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pelaksana fungsi audit intern, mengalami kondisi sakit yang sedikit mengganggu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal, namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan
- 8) Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan dari penunjukan audit eksternal
- 9) Sehubungan dengan terjadinya perubahan struktur organisasi BPR, mulai dari pengurus, sehingga terjadinya rotasi dan mutasi terutama di jajaran Pejabat Eksekutif memerlukan pembinaan dan peningkatan pengetahuan Pejabat Eksekutif
- 10) Pedoman dan kebijakan ketentuan BMPK yang di buat BPR belum sepenuhnya mengatur dan memperhatikan profile debitur khususnya yang masuk dalam pihak terkait, terutama kriteria pengecualian dari ketentuan BMPK
- 11) Sehubungan dengan terjadinya perubahan struktur data pelaporan ke pihak regulasi seperti pemberlakuan SAK EP, perlu dilakukan penyesuaian penyesuaaian Struktur dan infrastruktur, BPR belum sepenuhnya mampu melakukan penyesuaian struktur dan infrastruktur sistem dan informasi sepenuhnya dalam waktu yang cukup singkat
- 12) Rencana bisnis, belum secara jelas menggambarkan dukungan rencana strategis pemegang saham dalam penguatan permodalan BPR, yang selama ini hanya tumbuh dari pemupukan pertumbuhan laba BPR

B. Proses

- 1) Terdapat keterbatasan terhadap akses permodalan, dan pemenuhan kewajiban apabila secara darurat diperlukan dana tambahan dari pemegang saham
- 2) Dalam proses realisasi RBB terkadang kurang konsisten menjadikan RBB sebagai pedoman pencapaian target yang ditentukan, terutama apabila terjadinya perubahan perubahan situasi kondisi internal dan eksternal
- 3) Potensi akan terjadinya benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan melalui RUPS
- 4) BPR tidak wajib membentuk komite datau satuankerja
- 5) Proses pelaksanaan penanganan benturan kepentingan belum sepenuhnya dilaksanakan di setiap unit kerja dan level jabatan secara konsisten
- 6) Dengan terjadinya kekosongan salah satu direksi yaitu direktur utama menyebabkan penerapan kontriol fungsi kepatuhan dirsa kurang optimal, karena direksi yang membawahi fungsi kepatuhan menjabat sebagai direksi bisnis
- 7) Ruang lingkup objek pemeriksaan PE audit internal terkendala kondisi kesehatan pejabat PE, namun hal tersebut dapat dibantu oleh staf supervisi lainnya khususnya dalam audit pengawasan kredit
- 8) Dalam proses pelaksanaan audit eksternalhanya menggambarkan sebagian kecil permasalahan yang dihadapi BPR
- 9) Dalam proses realisasi penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud pelaksanaannya kadang kurang konsisten pada tahapan mitigasi dan pemantauan, baik pada manajemen risiko kredit, operasional, kepatuhan dan likuditas.
- 10) Dalam proses pemberian kredit meskipun sudah memperhatikan ketentuan BMPK, namun masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian terutama dalam mengukur profile debitur khususnya debitur debitur besar, seperti memperhatikan kemampuan bayar, dan sumber pembayaran., termasuk pada pihak terkait
- 11) Dalam proses realisasi system dan informasi terkadang masih terjadinya error system, yang disebabkan terjadinya penyesuaian system akibat penyesuaian dengan aturan regulasi, namun kurang berdampak signifikan terhadap proses layanan operasional, dan hal tersebut dapat teratasi segesar dalam proses bisnis normal
- 12) Dalam proses realisasi RBB terkadang kurang konsisten menjadikan RBB sebagai pedoman pencapaian target yang ditentukan, terutama apabila terjadinya perubahan perubahan situasi kondisi internal dan eksternal

C. Hasil

- 1) Pada periode pelaporan masih adanya temuan pemeriksaan OJK adanya kelemahan dalam potensi terjadinya benturan, yang mana hal tersebut dapat diselesaikan melalui perbaikan ketentuan dan prosedur hal tersebut.
- 2) Masih terdapat temuan temuan yang bersifat administratif, independensi direksi dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya yang perlu dilakukan evaluasi secara bekal
- 3) Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh dari realisasi hasil-hasil realiasi RBB di semua faktor dan indikator kinerja, untuk perbaikan kedepan
- 4) BPR tidak wajib membentuk komite datau satuankerja
- 5) Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terhadap penanganan benturan di setiap unit kerja
- 6) Belum sepenuhnya penerapan kepatuhan apada seluruh aspek bisnis, dan dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap setiap aspek usaha
- 7) Cakupan hasil pemeriksaan audit internal belum menggambarkan secara utu permasalahan di setiap unit kerja yang berpotensi terjadinya risiko tinggi terhadap risiko kredit, risiko operasional, kepatuhan dan likuiditas sebagai bahan perbaikan kedepan.
- 8) Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh dari hasil pemeriksaan KAP pada periode pemeriksaan untuk perbaikan kedepannya
- 9) Masih terdapat kelemahan dalam pengendalian risiko inhern operasional pada periode laporan sehubungan terjadinya kekosongan salah satu direksi akibat meninggal dunia, sehinga fungsi dan tugasnya dilaksanakan oleh

- direksi lainnya, perlu peningkatan pencegahan pemantauan potensi terjadinya fraud
- 10) Masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian terutama terhadap pinjaman pinjaman besar dan pihak terkait yang perlu terus dilakukan evaluasi dan perbaikan
 - 11) Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh dari realisasi sistem informasi pelaporan yang ada, sehubungan terjadinya perubahan perubahan regulasi yang cukup signifikan di tahun laporan
 - 12) Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh dari realisasi hasil-hasil realisasi RBB di semua faktor dan indikator kinerja, untuk perbaikan kedepan.

1. OPINI AKUNTAN PUBLIK

Laporan Keuangan PT BPR Hyaura Artalola per 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Auditor Independen kantor Akuntan Publik Roebiandini dan Rekan dengan laporan auditor menyatakan bahwa laporan keuangan terampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, neraca serta perhitungan laba rugi dan arus kasnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. *Penyajian laporan keuangan*

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) serta, apabila diperlukan, disesuaikan dengan praktek-praktek akuntansi industri perbankan yang berlaku dan pedoman pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas dan giro pada bank lain.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah.

b. *Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa*

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto nomor 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 November 1991 yang dimaksud dengan hubungan afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horisontal maupun vertikal.
- Hubungan antara perusahaan dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari perusahaan tersebut.
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan perusahaan atau dikendalikan oleh perusahaan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut.

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) No. 28 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", sebagai berikut:

- i. Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan
- ii. Entitas anak, joint venture, entitas asosiasi dari entitas
- iii. Personal manajemen kunci dari entitas induknya (secara aggregate)
- iv. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

- c. *Giro pada bank lain*
Transaksi giro pada bank lain diakui sebesar nilai nominal. Giro pada Bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan Bank.
- d. *Penempatan pada bank lain*
Penempatan pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan Bank. Dalam hal Bank membentuk penyisihan terjadinya kerugian dari penempatan tersebut, maka penyisihan disajikan sebagai pengurang dari pos penempatan tersebut.
- e. *Kredit yang diberikan*
Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kredit dinyatakan sebesar pokok kredit dikurangi dengan penyisihan kerugian.

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

- f. *Penyisihan Aset produktif*
Aset produktif terdiri dari penanaman dana bank dalam bentuk penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan. Penyisihan aset produktif dibentuk berdasarkan penelaahan manajemen terhadap masing-masing kualitas aset produktif pada setiap tanggal laporan dengan penyisihan kerugian sesuai dengan peraturan OJK No.33/POJK.03/2018 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat, terhadap penempatan pada bank lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga peminjam simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP umum dan khusus dan kredit yang diberikan, dengan rincian sebagai berikut.

PPAP Penempatan Pada Bank Lain :

PPAP = 0,5% x (Total penempatan pada bank lain – maksimal penjaminan LPS)

PPAP Kredit yang diberikan :

PPAP Umum

Aktiva Produktif memiliki kualitas lancar = 0,5 % PPAP Khusus :

PPAP Khusus

Aktiva Produktif memiliki kualitas Dalam perhatian khusus	: 3%
Aktiva Produktif memiliki kualitas Kurang lancar	: 10%
Aktiva Produktif memiliki kualitas Diragukan	: 50%
	: 100%

- g. *Aset tetap*
Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat (tahun)	Tarif
Bukan bangunan:		
Kendaraan – roda dua	4	25,00
Kendaraan – roda empat	8	12.50
Inventaris kantor	4	25,00
Komputer dan software	4	25,00
Bangunan:		
Permanen	20	5,00%

Sesuai dengan kebijakan manajemen, Bank telah membentuk kebijakan batas kapitalisasi aset tetap sebesar Rp1.000.000

- h. *Biaya dibayar di muka*
Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).
- i. *Pajak penghasilan*
Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Perhitungan pajak penghasilan dilakukan pada akhir periode akuntansi.
- j. *Simpanan*
Giro, tabungan dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. *Pendapatan dan beban bunga*

Pendapatan dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode akrual.

Perusahaan tidak

mengakui pendapatan bunga atas kredit yang diberikan atau aset produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai non *performing*.

Pendapatan bunga atas aset non *performing* diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai (*cash basis*). Pendapatan bunga atas aset non *performing* yang belum diterima, dilaporkan dalam komitmen dan kontinjensi.

l. *Pendapatan provisi dan komisi*

Pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan langsung dengan kegiatan pemberian kredit diakui dengan metode garis lurus selama jangka waktu kredit untuk kredit diatas Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Provisi kredit kurang dari jumlah tersebut diakui sebagai pendapatan pada tanggal transaksi.

m. *Imbalan kerja*

Pada tanggal 20 Juni 2000, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan No. Kep-Men/2000 mengenai "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon", yang mengharuskan perusahaan membayar imbalan kerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja berdasarkan lamanya masa kerja karyawan yang bersangkutan dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam surat keputusan tersebut.

Surat keputusan No. Kep-150/men/2000, sejak tanggal 25 Maret 2003 digantikan dengan berlakunya undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Perusahaan akan mengakui uang pesangon sebagai kewajiban dan beban hanya bilamana perusahaan mempunyai rencana pemutusan hubungan kerja formal dan tidak terdapat kemungkinan untuk membatalkannya.

Rencana pemutusan hubungan kerja mencakup:

- a. Jumlah karyawan serta fungsinya
- b. Jumlah uang pesangon untuk masing-masing karyawan
- c. Waktu melaksanakan rencana tersebut atau
- d. Menawarkan uang pesangon kepada karyawan agar mengundurkan diri secara sukarela

Bila terdapat karyawan mengundurkan diri diluar rencana pemutusan hubungan kerja, perusahaan akan memahami kewajiban dan menjadi beban tahun berjalan yang dibayar secara tunai.

PT BPR Hayura Artalola untuk memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut di atas, telah melaksanakan dengan cara membentuk tabungan DPLK pada Bank BNI dan kewajiban imbalan kerja lainnya. Posisi saldo pengembangan dana sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp534.637.102 untuk DPLK BNI 46 dan JHT (Jaminan Hari Tua) pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebesar Rp919.871.150 serta saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp488.021.096 untuk DPLK dan BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp919.871.150.

PT BPR HAYURA ARTALOLA NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	catatan	2024	2023
ASET			
K a s	3	58.770.200	85.205.000
Giro pada bank lain	4	2.486.762.689	3.424.593.381
Pendapatan yang masih akan diterima	5	675.175.530	610.851.617
Penempatan pada bank lain	6	4.694.964.336	1.723.783.462
Penyisihan penempatan pada bank lain		(1.827.492)	(5.124.015)
Kredit yang diberikan	7	36.283.116.689	33.494.939.978
Penyisihan penghapusan kredit		(295.199.649)	(338.668.604)
Aset tetap	8	2.422.812.886	2.358.011.152
Akumulasi penyusutan aset tetap		(1.334.971.975)	(1.334.397.640)
Aset lain-lain	9	152.751.493	236.673.519
Jumlah Aset		45.142.354.707	40.255.867.850
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	10	37.446.602	20.094.732
Utang bunga	11	57.548.909	54.263.603
Utang pajak	12	175.881.262	206.436.420
Simpanan	13	32.897.996.012	32.558.604.611
Pinjaman diterima	14	4.066.075.962	-
Kewajiban lain-lain	15	164.886.120	169.551.538
Jumlah Kewajiban		37.399.834.867	33.008.950.904
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar 100.000 lembar saham biasa nominal Rp50.000 per lembar per 31 Desember 2024 dan 2023 ditempatkan dan disetor per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebanyak 44.000 lembar saham biasa.	16	2.200.000.000	2.200.000.000
Saldo laba			
Tidak ditentukan penggunaannya		4.502.519.859	4.006.916.945
Ditentukan penggunaannya		1.040.000.000	1.040.000.000
Jumlah Ekuitas		7.742.519.859	7.246.916.945
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		45.142.354.726	40.255.867.849

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR HAYURA ARTALOLA
LAPORAN LABA RUGI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	catatan	2024	2023
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan bunga	17		
Bunga kontraktual		9.716.516.133	8.698.396.640
Provisi dan komisi		478.107.527	443.266.842
Total		10.194.623.660	9.141.663.482
Beban bunga	18	1.758.255.036	1.425.664.483
Pendapatan bunga - neto		8.436.368.624	7.715.998.999
Pendapatan operasional lainnya	19	867.790.072	779.786.186
Jumlah Pendapatan Operasional		9.304.158.696	8.495.785.185
Beban penyisihan kerugian / penyusutan	20		
Beban penyisihan kerugian aset produktif			
Beban penyisihan kerugian tabungan / deposito		67.241.276	45.687.282
Beban penyisihan kerugian kredit		542.926.822	695.822.378
Beban amortisasi beban ditangguhkan		-	-
Beban penyusutan aset tetap		180.863.699	157.611.302
Beban pemasaran	21	118.924.635	69.860.961
Beban administrasi dan umum	22	6.276.841.449	5.849.540.025
Jumlah beban operasional lainnya		7.186.797.881	6.818.521.948
Pendapatan (beban) operasional lainnya		(6.319.007.809)	(6.038.735.762)
Laba (Rugi) Operasional		2.117.360.815	1.677.263.237
Pendapatan (beban) non operasional	23	5.888.836	(76.946.574)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		2.123.249.651	1.600.316.663
Beban (penghasilan) pajak			
Taksiran pajak penghasilan	24	380.729.774	299.560.400
Laba (Rugi) Bersih		1.742.519.877	1.300.756.263

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR HAYURA ARTALOLA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Ditempatkan dan	Saldo laba tidak ditetapkan penggunaannya	Saldo laba ditetapkan penggunaannya	Jumlah ekuitas
Saldo per 31 Desember 2022	2.200.000.000	2.706.160.683	1.040.000.000	5.946.160.683
Cadangan Umum	-	-	-	-
Bonus dan tantiem	-	-	-	-
Pembagian Deviden tahun 2023	-	-	-	-
Laba Bersih per 31 Desember 2023	-	1.300.756.262	-	1.300.756.262
Saldo per 31 Desember 2023	2.200.000.000	4.006.916.945	1.040.000.000	7.246.916.945
Penambahan setoran Modal	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	-
Bonus dan Tantiem tahun 2024	-	-	-	-
Pembagian Deviden tahun 2024	-	(1.246.916.963)	-	(1.246.916.963)
Laba Bersih per 31 Desember 2024	-	1.742.519.877	-	1.742.519.877
Saldo per 31 Desember 2024	2.200.000.000	4.502.519.859	1.040.000.000	7.742.519.859

Catatan atas laporan keuangan
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

PT BPR HAYURA ARTALOLA LAPORAN ARUS KAS	2024	2023
Arus kas dari aktivitas operasi :		
Laba/ Rugi Bersih	1.742.519.877	1.300.756.263
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba/rugi bersih menjadi Kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan aset tetap	574.335	157.611.302
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	1.743.094.212	1.458.367.565
(Kenaikan) Penurunan dalam aset operasi :		
Pendapatan yang masih harus diterima	(64.323.913)	63.324.812
Penempatan pada bank lain	(2.974.477.397)	2.226.700.861
Kredit yang diberikan	(2.831.645.684)	(2.911.778.237)
Agunan yang diambil alih	-	-
Aset lain-lain	83.922.026	(115.940.881)
Kenaikan (Penurunan) dalam hutang operasi :		
Kewajiban segera	17.351.870	(62.235.643)
Utang bunga	3.285.306	(13.443.151)
Utang pajak	(30.555.158)	45.740.744
Simpanan	339.391.401	1.453.429.976
Pinjaman diterima	4.066.075.962	(210.340.402)
Kewajiban lain-lain	(4.665.418)	169.219.155
Dana setoran modal- kewajiban	-	-
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	347.453.206	2.103.044.799
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian tanah, bangunan dan peralatan	(245.091.134)	(44.023.544)
Penjualan/penghapusan aset tetap	180.289.400	-
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(64.801.734)	(44.023.544)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan		
Dana Setoran Modal (Ekuitas)	-	-
Dividen dan bonus	(1.246.916.963)	-
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(1.246.916.963)	-
Kenaikan (penurunan) bersih kas setara kas	(964.265.490)	2.059.021.255
Kas dan setara kas pada awal periode	3.509.798.381	1.450.777.126
Kas dan setara kas pada akhir periode	2.545.532.890	3.509.798.381
Kas dan setara kas :		
Kas	58.770.200	85.205.000
Giro pada bank lain	2.486.762.689	3.424.593.381
Jumlah kas dan setara kas	2.545.532.889	3.509.798.381

PT BPR HAYURA ARTALOLA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam
Rupiah Penuh)

29.

1. UMUM

Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola selanjutnya disebut "Bank" didirikan di Republik Indonesia yang bergerak dibidang jasa perbankan didirikan pada tanggal 20 Desember 1990 dengan nama PT BPR Hayura sesuai dengan Akta Notaris No. 6 dari Notaris Komar Andasasmita dan telah memperoleh persetujuan/pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 3 Mei 1991 Nomor : C2-1.538 HT.01.01.TH.91.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Tanggal 31 Januari 1994 Nomor: 218 Notaris Adjie Subandi Dharma Kesuma, SH mengubah Nama PT BPR Hayura menjadi PT BPR Hayura Artalola dan telah memperoleh persetujuan/pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1995 Nomor: C2-12.814 HT.01.04.th.95.

Bank telah memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-175/MK.13/1991 tanggal 6 Februari 1991.

Maksud dan tujuan dari Bank adalah membantu pemerintah Republik Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya perbankan.

Sebagai bank yang bergerak ke sektor usaha mikro dan kecil, BPR memainkan peranan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan perekonomian dengan pola-pola pendekatan yang lebih persuasif peningkatan pelayanan jemput bola secara langsung berhadapan dengan para pelaku usaha mikro dan kecil tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian bank, namun pada kenyataannya perkembangan BPR masih dihadapkan pada kendala-kendala baik kendala operasional maupun dengan para competitor dimana BPR harus mampu bersaing bukan hanya dengan Bank-bank umum yang membuka unit mikronya namun dengan Leasing dan pegadaian/pegadaian yang pada saat ini sudah beroperasi di setiap kota kecamatan

Perkembangan yang telah dicapai selama ini didapat dengan kerja keras disamping memberikan pelayanan yang terbaik PT BPR Hayura Artalola juga senantiasa mempunyai keunggulan-keunggulan yang kompetitif sehingga *customer* BPR Hayura tidak berpaling ke bank yang lain.

Kantor operasional Bank berlokasi di Jl. Raya Pasir Jambu No.139 Ciwidey Kab.Bandung dan kantor kas yang terletak di jalan Soreang-Banjarnan No.179 Kab.Bandung

Berdasarkan Akta Keterangan Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Hayura Artalola No.1 Tanggal 4 Juni 2018 dengan Notaris Mulyana Mitrasetia,S.H

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Hayura Artalola Nomor : 01 tanggal 4 Juni 2018 dengan Notaris Mulyana Mitrasetia, S. H., adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Mutiq Yusmita Hadyat
Komisaris : Tatan Suratman

Direksi

Direktur Utama : Dedi Rusamsi
Direktur Operasional : Hj. Teulis Ratna Komala
Direktur Kepatuhan : Hj. Teulis Ratna Komala

Susunan dewan komisaris dan direksi tersebut telah disetujui dan dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan No. S-171/KR.0212/2018 tanggal 7 Juni 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 jumlah karyawan Bank masing-masing 44 orang dan 44 orang. Jumlah yang dibayarkan kepada komisaris, direksi dan pihak-pihak lainnya sebesar Rp1.456.313.467 pada tahun 2024 dan Rp1.111.270.000, pada tahun 2023.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

3. KAS

Saldo kas per 31 Desember 2024 dan 2023 , dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kas Teller	58.770.200	85.205.000
Jumlah	<u>58.770.200</u>	<u>85.205.000</u>

4. GIRO PADA BANK LAIN

Saldo rekening koran Bank per 31 Desember 2024 dan 2023 pada Bank lain, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bank Negara Indonesia	2.332.081	2.632.081
Bank Central Asia	122.384.828	122.794.828
Bank Niaga	11.387.328	11.747.329
Bank Mandiri	950.000	950.000
Bank Rakyat Indonesia	35.517.713	35.656.367
Bank Danamon	6.002.735	7.802.046
Bank BJB Padalarang	5.869.938	66.131.299
Bank BJB Soreang	4.545.265	154.708.591
Bank BNI LIK	2.297.772.801	3.022.170.840
Jumlah	<u>2.486.762.689</u>	<u>3.424.593.381</u>

5. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

Pendapatan bunga yang masih akan diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kredit Retail I	75.570.726	73.684.457
Kredit Retail II	370.773.236	267.949.551
Kredit Middle	105.281.154	160.887.407
Kredit Karyawan	9.752.580	11.657.512
Kredit TOP	-	-
Kredit Porsi Haji	566.461	164.673
Kredit Middle Special	101.843.193	77.851.144
Kredit Tanpa Agunan (KTA)	3.361.680	5.549.813
Kredit Sertifikasi	8.026.500	13.107.060
Pendapatan Bunga Giro, Tabungan & Deposito	-	-
Jumlah	<u>675.175.530</u>	<u>610.851.617</u>

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Saldo penanaman dana Bank dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan per 31 Desember 2024 dan 2023, terdiri dari :

	2024	2023
Deposito Berjangka		
Deposito On Call/MMA BNI 7 Hari Rate 2,5%	-	-
Jumlah Deposito Berjangka	-	-
Tabungan		
Tabungan Danamon	1.964.848.550	1.355.172.168
Tabungan Bank Mandiri Kopo	2.057.705.158	356.505.018
Tabungan Bank Muamalat	531.205	887.901
BPR Karyajatnika Sadaya	671.879.424	11.218.375
Jumlah Tabungan	4.694.964.336	1.723.783.462
Penempatan Pada Bank Lain	4.694.964.336	1.723.783.462
PPAP Penempatan Pada Bank Lain	(1.827.492)	(5.124.015)
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	4.694.964.336	1.718.659.447

Berdasarkan penelaahan dan evaluasi manajemen bank, kolektibilitas penempatan pada bank lain diklasifikasikan lancar.

Suku bunga penempatan pada Bank lain untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing 1%-3,5% dan 1% - 3%.

a) Tabungan yang dijadikan jaminan/agunan dari pinjaman diterima, sebesar Rp.141.958.405,- pada tahun 2023.

Penempatan pada bank lain, menurut jangka waktunya :

	2024	2023
Penempatan pada bank lain, menurut jangka waktunya :		
Kurang dari 1 bulan	4.694.964.336	1.723.783.463
1 bulan	-	-
3 bulan	-	-
1 tahun	-	-
Jumlah	4.694.964.336	1.723.783.463

Mutasi penyisihan penghapusan penempatan pada Bank lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024	2023
Saldo awal 01 Januari 2024 dan 2023	5.124.015	-
Penyisihan	67.241.276	45.687.282
Pemulihan	(70.537.799)	(40.563.267)
Saldo akhir 31 Desember 2024 dan 2023	1.827.492	5.124.015
Penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk	1.827.492	5.124.015
Persentase PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk	100%	100%

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

7. KREDIT YANG DIBERIKAN

Baki debit kredit per 31 Desember 2024 dan 2023, yang terdiri dari :
 Jenis kredit :

	2024					
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Kredit Retail I	3.832.190.641	83.184.297	11.997.671	4.477.809	14.311.499	3.946.161.917
Kredit Retail II	17.338.058.398	1.026.874.775	231.878.487	87.577.313	42.496.318	18.726.885.291
Kredit Middle	4.815.624.871	443.366.542	58.342.242	52.473.852	140.993.845	5.510.801.352
Kredit Karyawan	1.532.594.702	-	-	-	-	1.532.594.702
Kredit KS	-	-	-	-	-	-
Kredit MSR	5.681.374.525	252.604.555	-	120.849.182	137.375.000	6.192.203.262
Kredit Sertifikasi	681.316.696	-	-	-	-	681.316.696
Kredit Porsi Haji	42.291.662	-	-	-	-	42.291.662
Kredit Tanpa Agunan	152.975.438	-	-	-	5.829.657	158.805.095
Jumlah	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.791.059.977
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	3.113.463
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(487.287.071)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(23.769.680)
Total Kredit	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.283.116.689

Sektor ekonomi :

	2024					
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pertanian	9.418.094.963	644.519.278	167.208.838	72.398.437	52.311.203	10.354.532.719
Perindustrian	2.922.354.330	215.097.326	7.104.537	12.458.321	39.156.032	3.196.170.546
Perdagangan	10.325.015.879	700.194.258	84.014.512	40.174.169	206.898.202	11.356.297.020
Jasa	3.534.950.477	49.484.327	27.284.105	44.756.794	42.640.882	3.699.116.585
Konsumtif	7.876.011.284	196.734.980	16.606.408	95.590.435	-	8.184.943.107
Jumlah	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.791.059.977
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	3.113.463
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(487.287.071)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(23.769.680)
Total Kredit	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.283.116.689

Jangka Waktu :

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

2024						
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	664.683.773	200.000.000	-	-	-	864.683.773
1 - 5 tahun	33.411.743.160	1.606.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	35.926.376.204
Jumlah	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.791.059.977
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	3.113.463
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(487.287.071)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(23.769.680)
Total Kredit	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.283.116.689

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Jenis Kredit :

2023						
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Kredit Retail I	3.596.652.355	146.012.174	6.575.342	5.595.000	7.493.782	3.762.328.653
Kredit Retail II	14.396.858.755	771.550.381	69.007.413	33.384.084	25.711.055	15.296.511.688
Kredit Middle	9.353.794.052	1.134.447.831	84.026.564	171.495.794	381.081.273	11.124.845.514
Kredit Karyawan	2.516.719.403	-	-	-	-	2.516.719.403
Kredit KS	968.136.147	22.354.173	-	-	-	990.490.320
Kredit MSR	-	-	-	-	-	-
Kredit TOP	-	-	-	-	-	-
Kredit Porsi Haji	18.749.999	-	-	-	-	18.749.999
Kredit Tanpa Agunan	235.225.467	5.916.061	8.537.316	-	-	249.678.844
Jumlah	31.086.136.178	2.080.280.620	168.146.635	210.474.878	414.286.110	33.959.324.421
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	73.332
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(439.802.967)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(24.654.808)
Total Kredit	31.086.136.178	2.080.280.620	168.146.635	210.474.878	414.286.110	33.494.939.978

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

Sektor Ekonomi :

		2023				
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pertanian	8.745.764.592	1.044.830.823	63.975.579	24.523.149	18.302.315	9.897.396.458
Perindustrian	2.340.247.937	190.115.321	23.660.260	14.985.678	29.795.630	2.598.804.826
Perdagangan	8.906.529.801	614.672.341	37.997.479	52.040.762	231.109.623	9.842.350.006
Jasa	2.734.852.851	69.143.238	-	87.814.347	42.895.571	2.934.706.007
Konsumtif	8.358.740.997	161.518.897	42.513.317	31.110.942	92.182.971	8.686.067.124
Jumlah	31.086.136.178	2.080.280.620	168.146.635	210.474.878	414.286.110	33.959.324.421
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	73.332
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(439.802.967)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(24.654.808)
Total Kredit	31.086.136.178	2.080.280.620	168.146.635	210.474.878	414.286.110	33.494.939.978

Jangka Waktu :

		2023				
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	1.741.838.855	25.888.586	5.274.932	-	13.992.559	1.786.994.932
1 - 5 tahun	29.344.297.323	2.054.392.034	162.871.703	210.474.878	400.293.551	32.172.329.489
Jumlah	31.086.136.178	2.080.280.620	168.146.635	210.474.878	414.286.110	33.959.324.421
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	73.332
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(439.802.967)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(24.654.808)
Total Kredit	31.086.136.178	2.080.280.620	168.146.635	210.474.878	414.286.110	33.494.939.978

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Dari jumlah kredit yang ada per 31 Desember 2024 dan 2023 tersebut termasuk didalamnya kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing sebesar Rp 1.560.691.950 dan sebesar Rp2.174.586.676 Kredit yang diklasifikasikan lancar sebesar Rp1.560.691.950 dan perhatian khusus sebesar Rp 0.

Informasi pokok :

- Kredit dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*) benda bergerak dan atau tidak bergerak dengan pengikatan secara hak tanggungan dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh bank.
- Suku bunga kredit dalam rupiah periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing 12% - 18% dan 16,8% - 18%
- Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.
- Kredit modal kerja diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja.
- Kredit yang diberikan kepada karyawan Bank merupakan kredit untuk kesejahteraan yang dibebani bunga per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 12% dan 12% dengan jangka waktu 5 tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.
- Rasio Non-Performing Loan (NPL) perusahaan (secara bruto) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 0,90% dan 0,88%.

Mutasi penyisihan penghapusan kredit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

	2024	2023
Saldo awal 01 Januari 2024 dan 2023	338.668.604	68.659.083
Penyisihan periode berjalan	542.926.822	695.822.378
Penghapusan kredit	-	-
Pemulihan	(586.395.777)	(425.812.857)
Penyisihan penghapusan kredit yang telah dibentuk	295.199.649	338.668.604
Penyisihan penghapusan kredit yang wajib dibentuk	295.199.649	338.668.604
Persentase PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk	100%	100%

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penghapusan kredit tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit tersebut.

8. ASET TETAP

Saldo nilai buku Aset tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

2024				
Nilai Perolehan :	Saldo per 31-12-2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31-12-2024
Tanah	386.700.000	-	-	386.700.000
Bangunan	603.417.308	-	-	603.417.308
Kendaraan	787.184.400	200.050.000	180.289.400	806.945.000
Inventaris Lainnya	127.409.900	37.276.534	-	164.686.434
Inventaris Peralatan kantor	453.299.544	7.764.600	-	461.064.144
Jumlah nilai perolehan	2.358.011.152	245.091.134	180.289.400	2.422.812.886
<i>Akumulasi Penyusutan :</i>				
Bangunan	377.135.810	30.170.865	-	407.306.675
Kendaraan	443.412.026	112.370.833	180.289.400	375.493.459
Inventaris Lainnya	117.488.986	11.038.620	-	128.527.606
Inventaris Peralatan kantor	396.360.818	27.283.417	-	423.644.235
Jumlah akumulasi penyusutan	1.334.397.640	180.863.735	180.289.400	1.334.971.975
Nilai Buku	1.023.613.512			1.087.840.911

8. ASET TETAP (lanjutan)

2023				
Nilai Perolehan :	Saldo per 31-12-2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31-12-2023
Tanah	386.700.000	-	-	386.700.000
Bangunan	603.417.308	-	-	603.417.308
Kendaraan	768.809.400	18.375.000	-	787.184.400
Inventaris Lainnya	127.409.900	-	-	127.409.900
Inventaris Peralatan kantor	427.651.000	25.648.544	-	453.299.544
Jumlah nilai perolehan	2.313.987.608	44.023.544	-	2.358.011.152
<i>Akumulasi Penyusutan :</i>				
Bangunan	346.964.945	30.170.865	-	377.135.810
Kendaraan	368.510.457	74.901.569	-	443.412.026
Inventaris Lainnya	109.200.992	8.287.994	-	117.488.986
Inventaris Peralatan kantor	352.109.944	44.250.874	-	396.360.818
Jumlah akumulasi penyusutan	1.176.786.338	157.611.302	-	1.334.397.640
Nilai Buku	1.137.201.270			1.023.613.512

Penambahan kendaraan tahun 2024 sebesar Rp 200.050.000 merupakan pembelian 1 unit Daihatsu Grandmax van 2024.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

9. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Sewa gedung	49.848.605	91.340.973
Persediaan ATK/barang cetakan	25.597.200	20.635.400
Persediaan materai tempel/teraan/perangko	5.190.000	820.000
Persediaan Map dan buku tabungan (Pass Book)	10.600.000	7.130.000
Beban ditangguhkan software	-	2.797.200
PPOB Hayura VSI	37.947.468	40.609.746
Tagihan Settlement VA Bank	16.466.720	64.586.300
Tagihan Settlement Alfamart	6.761.500	8.045.900
Tagihan Settlement Indomaret	340.000	708.000
Uang Muka macam-macam biaya	-	-
Jumlah	<u>152.751.493</u>	<u>236.673.519</u>

10. KEWAJIBAN SEGERA

Kewajiban segera per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Asuransi	32.696.602	15.944.732
Notaris	4.750.000	4.150.000
Jamsostek dan DPLK	-	-
Lainnya	-	-
Jumlah	<u>37.446.602</u>	<u>20.094.732</u>

11. UTANG BUNGA

Utang bunga per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bunga tabungan	1.716.501	4.811.679
Bunga deposito	38.712.619	47.067.469
Bunga pinjaman diterima	10.325.328	-
Bunga jatuh tempo	6.794.461	2.384.455
Jumlah	<u>57.548.909</u>	<u>54.263.603</u>

12. UTANG PAJAK

Utang pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

	2024	2023
PPh bunga tabungan	8.603.263	7.185.639
PPh bunga deposito	9.045.129	6.878.190
PPh pasal 25 dan 29	153.355.219	138.535.725
PPh pasal 21	4.746.677	53.823.538
PPh pasal 23	130.974	13.328
Jumlah	175.881.262	206.436.420

PPh pasal 25/29 sebesar Rp153.355,219 merupakan utang kekurangan pph pasal 29 tahun 2024.

13. SIMPANAN

Saldo simpanan per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	2024	2023
Tabungan	19.350.396.012	18.079.504.611
Deposito berjangka	13.547.600.000	14.479.100.000
Jumlah	32.897.996.012	32.558.604.611

Tabungan

Penempatan dana masyarakat dalam bentuk tabungan periode 31 Desember 2024 dan 2023 dengan tingkat suku bunga sebesar 3% - 4% per tahun dan 3% - 4% per tahun

Jumlah tabungan yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 pada Bank masing-masing sebesar Rp123.807.000 dan Rp3.638.185. Terdapat tabungan yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BPR pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp141.958.405.

	2024	2023
Menurut jangka waktunya :		
1 bulan	500.000.000	250.000.000
3 bulan	5.679.500.000	3.722.000.000
6 bulan	4.240.000.000	7.914.000.000
12 bulan	3.128.100.000	2.593.100.000
Jumlah	13.547.600.000	14.479.100.000

13. SIMPANAN (lanjutan)

Jumlah deposito berjangka yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 pada Bank masing-masing sebesar Rp150.000.000,- dan Rp 60.000.000,-. Deposito yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BPR masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp979.300.000,-. Tingkat suku bunga deposito berjangka periode 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing antara 4% - 6,75% dan 4% - 6,25%.

14. PINJAMAN DITERIMA

Pinjaman diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

	2024	2023
Pinjaman yang diterima lainnya - Bank lain :		
- BPR Karyaajatnika Sadaya	4.130.131.338	-
Pinjaman yang diterima lainnya - Non Bank :		
- Bank BJB KMK Tahap 2	-	-
Dikurangi :		
Biaya provisi	(39.999.988)	-
Biaya transaksi	(24.055.388)	-
Jumlah Pinjaman Diterima	4.066.075.962	-

- **BPR KARYAJATNIKA SADAYA**
 Berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor : SPPK/017/Maret/2024 tanggal 17 Mei 2024
- | | |
|--------------|---|
| Kredit | Rp 5.000.000.000 |
| | Rp 4.000.000.000 KAB-LB 1 |
| | Rp 1.000.000.000 KAB-LB 2 |
| Keperluan | Modal kerja BPR |
| Bentuk | KAB-LB SME |
| Suku bunga | 9% Efektif setara dengan 4.83% Flat |
| Jangka Waktu | 36 Bulan |
| Jaminan | - 1 Unit T/B di Jl. Raya Propinsi No. 139 Desa. Pasitrjambu, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung-SHGB No. 2 a.n PT. Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola (LT:389 m2, LB: 386.33 m2 masa berakhir hak guna bangunan : 06/12/2041) |

15. KEWAJIBAN LAIN – LAIN

Kewajiban lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	2024	2023
Cadangan pendidikan	141.747.958	127.064.160
Angsuran Bunga	5.203.162	3.132.578
Lainnya	17.935.000	39.354.800
Jumlah	164.886.120	169.551.538

Cadangan Pendidikan adalah dana cadangan Pendidikan yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan POJK 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan kualitas sumber daya manusia BPR dan BPR Syariah, yaitu sebesar 3% dari biaya personalia (biaya tenaga kerja) tahun lalu.

16. MODAL

Modal Bank per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	2024	2023
Modal dasar	5.000.000.000	5.000.000.000
Modal belum ditempatkan dan disetor	(2.800.000.000)	(2.800.000.000)
Modal yang telah ditempatkan dan disetor	2.200.000.000	2.200.000.000

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

Modal disetor tersebut telah dicatat dalam data base Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat No.AHU-11809.A.H.01.02 tahun 2009 tanggal 07 Oktober 2010 dan telah dicatat dalam administrasi bank Indonesia dengan surat No.12/655/DKBU/IDAd/Bd tanggal 26 Mei 2010. Perubahan komposisi penambahan modal disetor tahun 2010 telah ditatausahakan dalam administrasi pengawas Bank Indonesia sesuai dengan surat Nomor :13/86/DKBU/IDAd/Bd tanggal 25 Januari 2011.

Berdasarkan risalah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa (RUPSLB) PT BPR Hayura Artalola pada tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dibawah tangan disepakati menyetujui perubahan modal dasar menjadi Rp3.000.000.000, dan menyetujui melakukan tambahan setoran modal sebesar Rp1.200.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Yanti Rahmayanti S.H. nomor 01 tanggal 12 Desember 2013 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) sesuai Surat Keputusan Menhukham nomor AHV – 03132.AH.01.02 tanggal 22 Januari 2014, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Menyetujui perubahan modal dasar dari Rp2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000 (Lima milyar rupiah).

Berdasarkan Surat yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/Hal/Dir/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, perihal Laporan Perubahan Modal Dasar BPR, dan nomor 07/Hal/Dir/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal Laporan Perubahan Komposisi kepemilikan BPR.

Sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-99/KR.2012/2016 tanggal 29 Januari 2016, bahwa perubahan anggaran dasar dari Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta penambahan modal di setor sebesar Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), disetujui dan ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, komposisi saham BPR menjadi :

No	Nama Pemilik	Jumlah lembar	Jumlah nominal	Persentase
1	Hj. Gusti Nurmahrta	22.380	1.119.000.000	50,86%
2	H. Mutiq Yusmita Hadyat	20.540	1.027.000.000	46,68%
3	Dedi Rusamsi	1.080	54.000.000	2,46%

16. MODAL (lanjutan)

Cadangan per 31 Desember 2024 dan 2023, terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Cadangan umum	1.040.000.000	1.040.000.000
	<u>1.040.000.000</u>	<u>1.040.000.000</u>

17. PENDAPATAN BUNGA

- Bunga kontraktual :
 Bunga yang diperoleh per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Penempatan pada bank lain	58.311.863	50.521.632
Kredit yang diberikan	9.223.144.120	8.234.850.608
Bunga lainnya	435.060.150	413.024.400
Jumlah Bunga Yang Diperoleh	<u>9.716.516.133</u>	<u>8.698.396.640</u>

- Provisi dan komisi

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

Provisi dan komisi per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	2024	2023
Modal kerja	478.967.396	443.273.510
Bunga kredit - adm	(859.869)	(6.668)
Jumlah Provisi dan Komisi	478.107.527	443.266.842

18. BEBAN BUNGA

Beban bunga per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	2024	2023
Beban pihak ketiga bank lain		
Beban bunga deposito	408.662.133	510.954.376
Beban bunga pinjaman diterima	253.448.266	3.681.044
Beban bunga ABP lainnya	7.394.900	7.105.332
Jumlah Beban Bunga Pihak Ketiga Bank Lain	669.505.299	521.740.752

	2024	2023
Beban pihak ketiga		
Beban bunga tabungan	507.948.730	436.577.180
Beban bunga deposito	497.127.798	401.822.160
Beban bunga pinjaman diterima	-	-
Beban bunga provisi	10.000.012	876.734
Beban bunga biaya transaksi	6.013.928	1.693.046
Beban bunga pihak ketiga lainnya	67.659.269	62.954.611
Jumlah Beban Pihak Ketiga	1.088.749.737	903.923.731
Jumlah Beban Bunga	1.758.255.036	1.425.664.483

19. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan operasional lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	2024	2023
Tabungan/deposito	69.359.872	66.569.417
Denda kredit	155.642.267	147.799.224
Penghapusan kredit diberikan	4.077.800	17.218.556
Pemulihan Aktiva Produktif	573.923.902	466.026.971
Payment Point	5.997.106	7.203.140
Penyesuaian PPAP	-	349.150
Pinalti	545.228	5.580.548
Administrasi lainnya	8.896.400	9.239.100
Lainnya	49.347.497	59.800.080
Jumlah	867.790.072	779.786.186

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

20. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN/PENYUSUTAN

Beban penyisihan kerugian/penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	2024	2023
Penyisihan		
- Bank Non Giro	67.241.276	45.687.282
- Kredit yang diberikan	542.926.822	695.822.378
Jumlah beban penyisihan aset produktif	<u>610.168.098</u>	<u>741.509.660</u>
Penyusutan		
- Beban penyusutan aset tetap	180.863.699	157.611.302
Jumlah beban penyusutan aset tetap	<u>180.863.699</u>	<u>157.611.302</u>
Jumlah beban penyisihan/penyusutan	<u><u>791.031.797</u></u>	<u><u>899.120.962</u></u>

21. BEBAN PEMASARAN

Beban pemasaran per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	2024	2023
Beban promosi dan iklan	118.924.635	69.860.961
Jumlah Beban Pemasaran	<u>118.924.635</u>	<u>69.860.961</u>

22. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Beban administrasi dan umum merupakan beban karyawan, beban administrasi dan umum dan beban operasional lainnya, terdiri dari :

	2024	2023
Beban karyawan	5.013.564.382	4.709.639.917
Beban pendidikan	156.339.198	184.021.419
Beban sewa	75.257.725	75.445.941
Beban premi asuransi	224.986.979	207.824.316
Beban barang dan jasa	376.970.809	361.851.133
Pajak (kendaraan & lainnya)	19.011.782	29.855.380
Beban pemeliharaan dan perbaikan	347.387.805	229.353.940
Beban operasional lainnya	63.322.769	51.547.979
Jumlah	<u>6.276.841.449</u>	<u>5.849.540.025</u>

22. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (lanjutan)

Beban karyawan sebesar Rp 4.719.347.686, termasuk di dalamnya setoran JHT (Jaminan Hari Tua) pada BPJS Ketenagakerjaan dan setoran DPLK.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

23. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Selisih kas	11.112	11.947
Lainnya	79.676.238	6.491.224
Jumlah pendapatan non operasional	<u>79.687.350</u>	<u>6.503.171</u>
Beban non operasional :		
Beban sumbangan/hadiah	45.144.800	300.000
Beban selisih kas	10.014	9.698
Rugi penjualan AYDA	-	-
Lainnya	28.643.700	83.140.047
Jumlah beban non operasional	<u>73.798.514</u>	<u>83.449.745</u>
Jumlah	<u>5.888.836</u>	<u>(76.946.574)</u>

24. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	2.123.249.651	1.600.316.663
Tambah (kurang) beda tetap :		
- Pendapatan Tabungan dan Deposito	(69.359.872)	(66.569.417)
- Beban penjamuan nasabah	-	-
- Beban operasional lainnya	63.322.769	51.547.979
- Beban sumbangan	45.144.800	300.000
- Biaya non operasional lainnya	10.014	9.698
- Cadangan biaya pendidikan	14.683.798	127.000.000
- Biaya lain-lainnya	28.643.700	83.140.047
Jumlah	<u>82.445.209</u>	<u>195.428.307</u>
Laba (rugi) kena pajak menurut akuntansi	<u>2.205.694.860</u>	<u>1.795.744.970</u>
- Biaya penyusutan	-	-
- Biaya imbalan kerja	-	-
Tambah (kurang) beda temporer :	-	-
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>2.205.694.860</u>	<u>1.795.744.970</u>
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	<u>2.205.694.860</u>	<u>1.795.744.970</u>

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

24. BEBAN PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$\begin{array}{r} 4.800.000.000 \times \\ 11.142.101.082 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2.205.694.860 \\ = 950.209.951 \end{array}$$

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$2.205.694.860 - 950.209.951 = 1.255.484.909$$

Pajak Penghasilan 2024					
50% X	22% X	950.209.951	=	104.523.095	
	22% X	1.225.284.909	=	276.206.680	
				380.729.775	
Jumlah Pajak Penghasilan				380.729.775	
Pajak Dibayar dimuka PPh Pasal 25				(227.874.556)	
(Kelebihan) kekurangan PPh Pasal 29				152.855.219	

Pajak Penghasilan 2023					
50% X	22% X	868.212.570	=	95.503.383	
	22% X	1.225.284.909	=	204.057.018	
				299.560.400	
Jumlah Pajak Penghasilan				299.560.400	
Pajak Dibayar dimuka PPh Pasal 25				(161.024.675)	
(Kelebihan) kekurangan PPh Pasal 29				138.535.725	

Pada tahun 2021, tarif perhitungan PP badan berubah menjadi 22% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

25. TAGIHAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Komitmen dan kontinjensi per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	2024	2023
Aset kontinjensi	-	-
Bunga kredit yang diberikan	-	-
Aset produktif yang dihapus buku	-	-
Jumlah aset komitmen dan kontinjensi	-	-

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

26. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan normal usahanya, PT BPR Hayura Artalola melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan karyawan kunci Bank dan pemegang saham antara lain sebagai berikut:

<u>Pihak yang mempunyai hubungan istimewa</u>	<u>Sifat hubungan istimewa</u>	<u>Transaksi</u>
H. Mutiq Yusmita Hadyat	Komisaris dan Pemegang saham	Kredit dan Tabungan
Hj.Gusti Nurmahrita	Pemegang Saham	Kredit dan Tabungan
Tatan Suratman	Komisaris	Tabungan
Dedi Rusamsi	Direksi dan Pemegang saham	Kredit dan tabungan
Teulis Ratna Komala	Direksi	Kredit dan Tabungan

Transaksi dan saldo dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta prosentasenya terhadap masing-masing total transaksi dan saldo akun-akun yang terkait, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.102.500.008 dan Rp2.174.586.676, dengan presentase terhadap modal inti dan modal pelengkap sebesar 16,38% dan 32.8%.
- b. Deposito berjangka diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp150.000.000, dan Rp 60.000.000, dengan presentase terhadap jumlah simpanan deposito sebesar 0,52% dan 0.77%.
- c. Tabungan yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp123.807.000 dan Rp3.638.185 dengan presentase terhadap jumlah simpanan tabungan sebesar 0.43% dan 4%.

27. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 15/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang berakhirnya tugas dan penutupan BPPN, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004, Pemerintah Indonesia membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, sebuah institusi baru yang menggantikan BPPN, untuk melanjutkan pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah atas kewajiban pada Bank-bank lokal. Dan untuk Pelaksanaan Program Penjaminan tersebut Pemerintah membentuk lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud yaitu dengan disahkannya Undang-undang No. 24 pada tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pemerintah membebaskan premi berkaitan dengan program penjaminan tersebut sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode yang dibayarkan 2 (dua) kali setahun.

28. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Bahwa dalam rangka penyempurnaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan perkembangan produk serta pelayanan terutama yang berbasis teknologi informasi, risiko pemanfaatan BPR dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi maka Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan POJK Nomer 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penertapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan.

28. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (lanjutan)

Penerapan program anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sedikitnya mencakup :

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

- Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Pengendalian Intern
- Sistem Informasi Management
- Sumber Daya Manusia

Direksi bertanggung jawab atas penerapan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris (APU & PPT) di Sektor Jasa Keuangan, dengan membentuk unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan sesuai dengan peraturan tersebut.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

29. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
 a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

KETERANGAN	Nominal	Bobot Resiko %	ATMR
1. Kas	58,770.00	0	-
2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	0	-
3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.	75,187.00	0	-
4. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1(satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	0	-
5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR.	-	15	-
6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	7,176,651.00	20	1,435,330.40
7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	-	20	-
a. Kredit kepada bank lain	-	20	-
b. Kredit kepada Pemerintah Daerah	-	20	-
c. Bagian Kredit yang dijamin oleh bank lain	-	20	-
d. Bagian Kredit yang dijamin oleh Pemerintah Daerah	-	20	-
8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	-	20	-
9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia	7,527,499.00	30	2,258,250.40
10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20 %.	-	50	-
a. Kredit kepada BUMN/BUMD	-	50	-
b. Bagian Kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%	-	50	-
11. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan yang memenuhi persyaratan	-	50	-
12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan surat kuasa menjual yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	3,588,379.00	50	1,794,190.00
13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan	18,019,428.00	70	12,613,601.00
14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu	355,958.00	70	249,170.50
15. Tagihan atau kredit lainnya yg tidak memenuhi kriteria bobot resiko diatas	6,829,430.00	100	6,829,430.00
16. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	-	100	-
a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	10,294.00	100	10,294.00
b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	259,691.00	100	259,691.00
17. Aset tetap, inventaris dan aset tidak berwujud	1,087,841.00	100	1,087,841.00
18. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	-	100	-

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

29. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (lanjutan)

b. Rasio Kecukupan Modal

MODAL	-	0	-
I. MODAL INTI	-	0	-
I.1 Modal Inti Utama	-	0	-
1.1.1 Modal Disetor	2,200.00	100	2,200,000.00
1.1.2 Cadangan Tambahan Modal	-	0	-
1.1.2.1 Agio (Disagio)	-	100	-
1.1.2.2 Dana Setoran Modal Ekuitas	-	100	-
1.1.2.3 Modal Sumbangan	-	100	-
1.1.2.4 Cadangan Umum	440,000.00	100	440,000.00
1.1.2.5 Cadangan Tujuan	-	100	-
1.1.2.6 Laba (Rugi) tahun-tahun lalu	3,360,000.00	100	3,360,000.00
1.1.2.7 Laba (Rugi) tahun berjalan	2,123,249.00	0	-
1.1.2.7.1 Kekurangan pembentukan PPAP -/-	-	0	-
1.1.2.7.1 Taksiran hutang PPh dalam laba -/-	365,425.00	0	-
1.1.2.8 Laba (Rugi) tahun berjalan setelah dikurangi PPAP (maks. 50% setelah dikurangi taksiran hutang PPh)	1,742,519.00	50	871,912.00
1.1.2.9 Pajak tangguhan (deferred tax) -/-	-	100	-
1.1.2.10 Goodwill -/-	-	100	-
1.1.2.11 AYDA berupa tanah, bangunan dan/atau rumah -/-	-	0	-
1.1.2.11.1 Melampaui jk waktu 1 s.d 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	-	50	-
1.1.2.11.2 Melampaui jk waktu 3 s.d 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	-	75	-
1.1.2.11.3 Melampaui jk waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	-	100	-
1.1.2.12 AYDA berupa kendaraan bermotor dan sejenisnya -/-	-	0	-
1.1.2.12.1 Melampaui jk waktu 1 s.d 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	-	50	-
1.1.2.12.3 Melampaui jk waktu 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	-	100	-
Sub Total cadangan Tambahan Modal	-	0	4,678,912.00
Sub Total Modal Inti Utama	-	0	6,878,912.00
I.2 Modal Inti Tambahan	-	100	-
I.3 JUMLAH MODAL INTI (I.1+I.2)	-	0	6,878,912.00
II.MODAL PELENGKAP	-	0	-
II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti).	-	0	-
II.2 Keuntungan revaluasi aktiva tetap	-	100	-
II.3 PPAP Umum Yang Wajib Dibentuk (paling tinggi sebesar 1,25% dari Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum)	171,834.00	0	171,834.00
II.4 Jumlah Modal Pelengkap (paling tinggi sebesar 100% dari modal inti (II.1 + II.2 + II.3))	-	0	-
JUMLAH MODAL (I + II)	-	0	7,043,093.00
Rasio KPMM (Modal/ATMR)	-	0	25.73
Batas Maksimum pemberian Kredit	$\frac{1,757,825.00}{2,200,000.00} \times 100\%$	=	<u>79.90%</u>
MODAL	-	0	-
I. MODAL INTI	-	0	-
I.1 Modal Inti Utama	-	0	-
1.1.1 Modal Disetor	2,200.00	100	2,200,000.00
1.1.2 Cadangan Tambahan Modal	-	0	-
1.1.2.1 Agio (Disagio)	-	100	-
1.1.2.2 Dana Setoran Modal Ekuitas	-	100	-
1.1.2.3 Modal Sumbangan	-	100	-
1.1.2.4 Cadangan Umum	440,000.00	100	440,000.00
1.1.2.5 Cadangan Tujuan	-	100	-
1.1.2.6 Laba (Rugi) tahun-tahun lalu	3,360,000.00	100	3,360,000.00
1.1.2.7 Laba (Rugi) tahun berjalan	2,123,249.00	0	-

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

1.1.2.7.1 Kekurangan pembentukan PPAP -/-	-	0	-
1.1.2.7.1 Taksiran hutang PPh dalam laba -/-	365,425.00	0	-
1.1.2.8 Laba (Rugi) tahun berjalan setelah dikurangi PPAP (maks. 50% setelah dikurangi taksiran hutang PPh)	1,742,519.00	50	871,912.00
1.1.2.9 Pajak tangguhan (deferred tax) -/-	-	100	-
1.1.2.10 Goodwill -/-	-	100	-
1.1.2.11 AYDA berupa tanah, bangunan dan/atau rumah -/-	-	0	-
1.1.2.11.1 Melampaui jk waktu 1 s.d 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	-	50	-
1.1.2.11.2 Melampaui jk waktu 3 s.d 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	-	75	-
1.1.2.11.3 Melampaui jk waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	-	100	-
1.1.2.12 AYDA berupa kendaraan bermotor dan sejenisnya -/-	-	0	-
1.1.2.12.1 Melampaui jk waktu 1 s.d 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	-	50	-
1.1.2.12.3 Melampaui jk waktu 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	-	100	-
Sub Total cadangan Tambahan Modal	-	0	4,678,912.00
Sub Total Modal Inti Utama	-	0	6,878,912.00
I.2 Modal Inti Tambahan	-	100	-
I.3 JUMLAH MODAL INTI (I.1+I.2)	-	0	6,878,912.00
II.MODAL PELENGKAP	-	0	-
II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti).	-	0	-
II.2 Keuntungan revaluasi aktiva tetap	-	100	-
II.3 PPAP Umum Yang Wajib Dibentuk (paling tinggi sebesar 1,25% dari Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum)	171,834.00	0	171,834.00
II.4 Jumlah Modal Pelengkap (paling tinggi sebesar 100% dari modal inti (II.1 + II.2 + II.3))	-	0	-
JUMLAH MODAL (I + II)	-	0	7,043,093.00
Rasio KPMM (Modal/ATMR)	-	0	25.73
<p>Batas Maksimum pemberian Kredit $\frac{1,757,825.00 \times 100\%}{2.200.000.00} = 79.90\%$</p>			

29. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (lanjutan)

d. Kualitas Aktiva Produktif

Keterangan	Kredit	Surat Berharga	Penempatan Pada	Jumlah
1 Aktiva Produktif				
- Lancar	34,076,427.00		7,176,651.00	41,253,078.00
- Dalam PerhatianKhusus	1,806,030.00			1,806,030.00
- Kurang Lancar	302,218.00			302,218.00
- Diragukan	265,378.00			265,378.00
- Macet	341,006.00			341,006.00
Jumlah	36,791,059.00	-	7,176,651.00	43,967,710.00
2 Jumlah aktiva Produktif yang iklasifikasikan				-
- Lancar				-
- Dalam PerhatianKhusus				-
- Kurang Lancar	151,109.00			151,109.00
- Diragukan	199,033.50			199,033.50
- Macet	341,006.00			341,006.00

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

- Jumlah	691,148.50	-	-	691,148.50
3 PPAWD				-
- Lancar (0%)	170,041.00		1,793.00	171,834.00
- Dalam Perhatian Khusus (3%)	16,071.00			16,071.00
- Kurang Lancar (10%)	13,903.00			13,903.00
- Diragukan (50%)	13,904.00			13,904.00
- Macet (100%)	81,315.00			81,315.00
- Jumlah	295,234.00			297,027.00
Rasio Rasio	Jumlah aktiva Produktif yang diklasifikasikan		x 100 %	1.57%
	Aktiva Produktif			
	Penyisihan Penghaousan Aktiva Produktif		x 100%	100.00%
	PPAP yang Wajib Dibentuk			
Aset Tetap Terhadap Modal	<u>1,087,842.00</u>		X 100%	49%
	2,200,000.00			

29. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (lanjutan)

F Loan To Deposit Ratio (LDR)			
(Dalam Ribuan Rupiah)			
	Keterangan	Nominal	Prosentase
1	Simpanan Pihak Ke Tiga		
	1.2 Simpanan Berjangka	13,547,600.00	32.59%
	1.3 Tabungan	19,350,396.00	46.55%
2	Simpanan Diteima Lebih 3 Bulan	1,800,000.00	
3	Modal Pinjaman		
4	Modal Inti	6,868,912.00	16.52%
5	Jumlah Dana Pihak Ketiga	41,566,908.00	95.67%
6	Aktifa Produktif		
	6.1 Kredit Yasng Diberikan	36,791,060.00	100.00%
	6.2 Kredit yang diberikan Kepada bank Lain	-	
	6.3 Lainnya	-	
7	Jumlah Ajtiva Produktif	36,791,060.00	
8	LDR $\{(6(1+2+3):5)\} \times 100\%$		88.51%

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

g	Return On Asset(ROA)		
	<u>2,123,249.00</u> 45,142,354.00	x 100%	= 4.70%
h	Return On Equity (ROE)		
	<u>2,123,249.00</u> 6,868,912.00	x 100%	= 30.91%
i	Cah Ratio		
	<u>7,140,497.00</u> 28,642,237.00	x 100%	= 24.93%
j	Biaya Operasional / Pendapatan Operasional(rata rata)		
	<u>745,421.00</u> 921,867.00	x 100%	= 80.86%

30. INFORMASI LAIN

Pertumbuhan kredit tahun 2024 mengalami pertumbuhan dari posisi tahun 2023 sebesar 8.32% dan dana pihak ketiga tumbuh hanya 1.04% hambatan kanreka usaha mengalami kontraksi, risiko kredit yang meningkat membuat BPr harus selektif dalam memberikan kredit . disamping itu BPr menjaga likuiditas yang kondisinya terbatas karena dana pihak ketiga tabungan dan deposito juga masih tertekan

Secara keseluruhan total aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.142.354.726 mengalami kenaikan sebesar 7%, dibandingkan total aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.255.867.850

31. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Bank untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang diselesaikan masing-masing pada bulan Februari 2024 dan 2023.

32. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

Penutup

Laporan Keuangan Tahunan tahun 2024 ini merupakan gambaran kinerja selama kurun waktu satu tahun dengan kesimpulan bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola masih mampu menunjukkan kinerja yang baik walaupun dihadapkan pada berbagai tantangan dan persaingan juga penurunan daya beli masyarakat, selanjutnya management terus berupaya pencapaian hasil usaha di tahun-tahun yang akan datang dapat ditingkatkan dengan harapan BPR dapat terus tumbuh dan berkembang secara wajar.

Demikian Laporan Keuangan Tahunan ini dibuat untuk dijadikan bahan pertimbangan dimasa yang akan datang.

Ciwidey, 08 April 2025
PT BPR HAYURA ARTALOLA


TEULIS RATNA KOMALA
Direktur Utama



HAYURAARTALOLA


USEP SUBHAN
Dir. Oprs & YMFK



PT BPR HAYURA ARTALOLA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kantor Pusat: Jl. Pasirjambu No. 139 Ciwidey – Bandung 40972

Telp. (022) 5928680 Fax. (022) 5929008

Kantor Kas: Jl. Soreang Banjaran No. 179 Ciburial – Soreang, Bandung 40911

Telp. (022) 85871693

Kantor Kas: Jl. Raya Rancabali KM 7 No. 1 Alamendah – Rancabali, Bandung

40973 Telp. (022) 85924225

PT BPR HAYURA ARTALOLA
NERACA
 Per 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	catatan	2024	2023
ASET			
Kas	3	58.770.200	85.205.000
Giro pada bank lain	4	2.486.762.689	3.424.593.381
Pendapatan yang masih akan diterima	5	675.175.530	610.851.617
Penempatan pada bank lain	6	4.694.964.336	1.723.783.462
Penyisihan penempatan pada bank lain		(1.827.492)	(5.124.015)
Kredit yang diberikan	7	36.283.116.689	33.494.939.978
Penyisihan penghapusan kredit		(295.199.649)	(338.668.604)
Aset tetap	8	2.422.812.886	2.358.011.152
Akumulasi penyusutan aset tetap		(1.334.971.975)	(1.334.397.640)
Aset lain-lain	9	152.751.493	236.673.519
Jumlah Aset		45.142.354.707	40.255.867.850
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	10	37.446.602	20.094.732
Utang bunga	11	57.548.909	54.263.603
Utang pajak	12	175.881.262	206.436.420
Simpanan	13	32.897.996.012	32.558.604.611
Pinjaman diterima	14	4.066.075.962	-
Kewajiban lain-lain	15	164.886.120	169.551.538
Jumlah Kewajiban		37.399.834.867	33.008.950.904
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar 100.000 lembar saham biasa nominal Rp50.000 per lembar per 31 Desember 2024 dan 2023 ditempatkan dan disetor per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebanyak 44.000 lembar saham biasa.	16	2.200.000.000	2.200.000.000
Saldo laba			
Tidak ditentukan penggunaannya		4.502.519.859	4.006.916.945
Ditentukan penggunaannya		1.040.000.000	1.040.000.000
Jumlah Ekuitas		7.742.519.859	7.246.916.945
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		45.142.354.726	40.255.867.849

Bandung, 10 Februari 2025

Direktur Utama

Hj. Teulis Ratna Komala

Direktur

Usep Subhan

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR HAYURA ARTALOLA
LAPORAN LABA RUGI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	catatan	2024	2023
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan bunga	17		
Bunga kontraktual		9.716.516.133	8.698.396.640
Provisi dan komisi		478.107.527	443.266.842
Total		10.194.623.660	9.141.663.482
Beban bunga	18	1.758.255.036	1.425.664.483
Pendapatan bunga - neto		8.436.368.624	7.715.998.999
Pendapatan operasional lainnya	19	867.790.072	779.786.186
Jumlah Pendapatan Operasional		9.304.158.696	8.495.785.185
Beban penyisihan kerugian / penyusutan	20		
Beban penyisihan kerugian aset produktif			
Beban penyisihan kerugian tabungan / deposito		67.241.276	45.687.282
Beban penyisihan kerugian kredit		542.926.822	695.022.378
Beban amortisasi beban ditangguhkan		-	-
Beban penyusutan aset tetap		180.863.699	157.611.302
Beban pemasaran	21	118.924.635	69.860.961
Beban administrasi dan umum	22	6.276.841.449	5.849.540.025
Jumlah beban operasional lainnya		7.186.797.881	6.818.521.948
Pendapatan (beban) operasional lainnya		(6.319.007.809)	(6.038.735.762)
Laba (Rugi) Operasional		2.117.360.815	1.677.263.237
Pendapatan (beban) non operasional	23	5.888.836	(76.946.574)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		2.123.249.651	1.600.316.663
Beban (penghasilan) pajak			
Taksiran pajak penghasilan	24	380.729.774	299.560.400
Laba (Rugi) Bersih		1.742.519.877	1.300.756.263

Bandung, 10 Februari 2025

Direktur Utama

Hj. Teulis Ratna Komala

Direktur

Usep Subhan

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR HAYURA ARTALOLA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Ditempatkan dan	Saldo laba tidak ditetapkan penggunaannya	Saldo laba ditetapkan penggunaannya	Jumlah ekuitas
Saldo per 31 Desember 2022	2.200.000.000	2.706.160.683	1.040.000.000	5.946.160.683
Cadangan Umum	-	-	-	-
Bonus dan tantiem	-	-	-	-
Pembagian Deviden tahun 2023	-	-	-	-
Laba Bersih per 31 Desember 2023	-	1.300.756.262	-	1.300.756.262
Saldo per 31 Desember 2023	2.200.000.000	4.006.916.945	1.040.000.000	7.246.916.945
Penambahan setoran Modal	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	-
Bonus dan Tantiem tahun 2024	-	-	-	-
Pembagian Deviden tahun 2024	-	(1.246.916.963)	-	(1.246.916.963)
Laba Bersih per 31 Desember 2024	-	1.742.519.877	-	1.742.519.877
Saldo per 31 Desember 2024	2.200.000.000	4.502.519.859	1.040.000.000	7.742.519.859

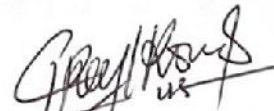
Bandung, 10 Februari 2025

Direktur Utama



Hj. Teulis Ratna Komala

Direktur



Usep Subhan

*Catatan atas laporan keuangan
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

PT BPR HAYURA ARTALOLA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
Arus kas dari aktivitas operasi :		
Laba/ Rugi Bersih	1.742.519.877	1.300.756.263
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba/rugi bersih menjadi Kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan aset tetap	574.335	157.611.302
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	1.743.094.212	1.458.367.565
(Kenaikan) Penurunan dalam aset operasi :		
Pendapatan yang masih harus diterima	(64.323.913)	63.324.812
Penempatan pada bank lain	(2.974.477.397)	2.226.700.861
Kredit yang diberikan	(2.831.645.684)	(2.911.778.237)
Agunan yang diambil alih	-	-
Aset lain-lain	83.922.026	(115.940.881)
Kenaikan (Penurunan) dalam hutang operasi :		
Kewajiban segera	17.351.870	(62.235.643)
Utang bunga	3.285.306	(13.443.151)
Utang pajak	(30.555.158)	45.740.744
Simpanan	339.391.401	1.453.429.976
Pinjaman diterima	4.066.075.962	(210.340.402)
Kewajiban lain-lain	(4.665.418)	169.219.155
Dana setoran modal- kewajiban	-	-
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	347.453.206	2.103.044.799
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian tanah, bangunan dan peralatan	(245.091.134)	(44.023.544)
Penjualan/penghapusan aset tetap	180.289.400	-
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(64.801.734)	(44.023.544)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan		
Dana Setoran Modal (Ekuitas)	-	-
Dividen dan bonus	(1.246.916.963)	-
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(1.246.916.963)	-
Kenaikan (penurunan) bersih kas setara kas	(964.265.490)	2.059.021.255
Kas dan setara kas pada awal periode	3.509.798.381	1.450.777.126
Kas dan setara kas pada akhir periode	2.545.532.890	3.509.798.381
Kas dan setara kas :		
Kas	58.770.200	85.205.000
Giro pada bank lain	2.486.762.689	3.424.593.381
Jumlah kas dan setara kas	2.545.532.889	3.509.798.381

Bandung, 10 Februari 2025

Direktur Utama

Hj. Teulis Ratna Komala

Direktur

Usep Subhan

Catatan atas laporan keuangan
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

1. UMUM

Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola selanjutnya disebut "Bank" didirikan di Republik Indonesia yang bergerak dibidang jasa perbankan didirikan pada tanggal 20 Desember 1990 dengan nama PT BPR Hayura sesuai dengan Akta Notaris No. 6 dari Notaris Komar Andasasmita dan telah memperoleh persetujuan/pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 3 Mei 1991 Nomor : C2-1.538 HT.01.01.TH.91.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Tanggal 31 Januari 1994 Nomor : 218 Notaris Adjie Subandi Dharma Kesuma, SH mengubah Nama PT BPR Hayura menjadi PT BPR Hayura Artalola dan telah memperoleh persetujuan/pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1995 Nomor : C2-12.814 HT.01.04.th.95.

Bank telah memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-175/MK.13/1991 tanggal 6 Februari 1991.

Maksud dan tujuan dari Bank adalah membantu pemerintah Republik Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya perbankan.

Sebagai bank yang bergerak ke sektor usaha mikro dan kecil, BPR memainkan peranan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan perekonomian dengan pola-pola pendekatan yang lebih persuasif peningkatan pelayanan jemput bola secara langsung berhadapan dengan para pelaku usaha mikro dan kecil tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian bank, namun pada kenyataannya perkembangan BPR masih dihadapkan pada kendala-kendala baik kendala operasional maupun dengan para kompetitor dimana BPR harus mampu bersaing bukan hanya dengan Bank-bank umum yang membuka unit mikronya namun dengan Leasing dan pegadaian-pegadaian yang pada saat ini sudah beroperasi di setiap kota kecamatan

Perkembangan yang telah dicapai selama ini didapat dengan kerja keras disamping memberikan pelayanan yang terbaik PT BPR Hayura Artalola juga senantiasa mempunyai keunggulan-keunggulan yang kompetitif sehingga *customer* BPR Hayura tidak berpaling ke bank yang lain.

Kantor operasional Bank berlokasi di Jl. Raya Pasir Jambu No.139 Ciwidey Kab.Bandung dan kantor kas yang terletak di jalan Soreang-Banjaran No.179 Kab.Bandung

Berdasarkan Akta Keterangan Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Hayura Artalola No.1 Tanggal 4 Juni 2018 dengan Notaris Mulyana Mitrasetia,S.H

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Hayura Artalola Nomor : 01 tanggal 4 Juni 2018 dengan Notaris Mulyana Mitrasetia,S. H., adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Mutiq Yusmita Hadyat
Komisaris : Tatan Suratman

Direksi

Direktur Utama : Dedi Rusamsi
Direktur Operasional : Hj. Teulis Ratna Komala
Direktur Kepatuhan : Hj. Teulis Ratna Komala

Susunan dewan komisaris dan direksi tersebut telah disetujui dan dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan No. S-171/KR.0212/2018 tanggal 7 Juni 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 jumlah karyawan Bank masing-masing 44 orang dan 44 orang. Jumlah yang dibayarkan kepada komisaris, direksi dan pihak-pihak lainnya sebesar Rp1.456.313.467 pada tahun 2024 dan Rp1.111.270.000, pada tahun 2023.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. *Penyajian laporan keuangan*

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) serta, apabila diperlukan, disesuaikan dengan praktek-praktek akuntansi industri perbankan yang berlaku dan pedoman pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas dan giro pada bank lain.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah.

b. *Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa*

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto nomor 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 November 1991 yang dimaksud dengan hubungan afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horisontal maupun vertikal.
- Hubungan antara perusahaan dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari perusahaan tersebut.
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan perusahaan atau dikendalikan oleh perusahaan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut.

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) No. 28 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", sebagai berikut:

- (i) Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan
- (ii) Entitas anak, joint venture, entitas asosiasi dari entitas
- (iii) Personal manajemen kunci dari entitas induknya (secara algrigate)
- (iv) Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

c. *Giro pada bank lain*

Transaksi giro pada bank lain diakui sebesar nilai nominal. Giro pada Bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan Bank.

d. *Penempatan pada bank lain*

Penempatan pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan Bank. Dalam hal Bank membentuk penyisihan terjadinya kerugian dari penempatan tersebut, maka penyisihan disajikan sebagai pengurang dari pos penempatan tersebut.

e. *Kredit yang diberikan*

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kredit dinyatakan sebesar pokok kredit dikurangi dengan penyisihan kerugian.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Penyisihan Aset produktif

Aset produktif terdiri dari penanaman dana bank dalam bentuk penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan. Penyisihan aset produktif dibentuk berdasarkan penelaahan manajemen terhadap masing-masing kualitas aset produktif pada setiap tanggal laporan dengan penyisihan kerugian sesuai dengan peraturan OJK No.33/POJK.03/2018 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat, terhadap penempatan pada bank lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga peminjam simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP umum dan khusus dan kredit yang diberikan, dengan rincian sebagai berikut.

PPAP Penempatan Pada Bank Lain :

PPAP = 0,5% x (Total penempatan pada bank lain – maksimal penjaminan LPS)

PPAP Kredit yang diberikan :

PPAP Umum

Aktiva Produktif memiliki kualitas lancar = 0,5 %

PPAP Khusus :

Aktiva Produktif memiliki kualitas Dalam perhatian khusus : 3%
 Aktiva Produktif memiliki kualitas Kurang lancar : 10%
 Aktiva Produktif memiliki kualitas Diragukan : 50%
 Aktiva Produktif memiliki kualitas Macet : 100%

g. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat (tahun)	Tarif
Bukan bangunan:		
Kendaraan – roda dua	4	25,00%
Kendaraan – roda empat	8	12.50%
Inventaris kantor	4	25,00%
Komputer dan software	4	25,00%
Bangunan:		
Permanen	20	5,00%

Sesuai dengan kebijakan manajemen, Bank telah membentuk kebijakan batas kapitalisasi aset tetap sebesar Rp1.000.000.

h. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

i. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Perhitungan pajak penghasilan dilakukan pada akhir periode akuntansi.

j. Simpanan

Giro, tabungan dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode akrual. Perusahaan tidak mengakui pendapatan bunga atas kredit yang diberikan atau aset produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai non *performing*.

Pendapatan bunga atas aset non *performing* diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai (*cash basis*). Pendapatan bunga atas aset non *performing* yang belum diterima, dilaporkan dalam komitmen dan kontinjensi.

l. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan langsung dengan kegiatan pemberian kredit diakui dengan metode garis lurus selama jangka waktu kredit untuk kredit diatas Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Provisi kredit kurang dari jumlah tersebut diakui sebagai pendapatan pada tanggal transaksi.

m. Imbalan kerja

Pada tanggal 20 Juni 2000, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan No. Kep-Men/2000 mengenai "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon", yang mengharuskan perusahaan membayar imbalan kerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja berdasarkan lamanya masa kerja karyawan yang bersangkutan dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam surat keputusan tersebut.

Surat keputusan No. Kep-150/men/2000, sejak tanggal 25 Maret 2003 digantikan dengan berlakunya undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Perusahaan akan mengakui uang pesangon sebagai kewajiban dan beban hanya bilamana perusahaan mempunyai rencana pemutusan hubungan kerja formal dan tidak terdapat kemungkinan untuk membatalkannya.

Rencana pemutusan hubungan kerja mencakup :

- a. Jumlah karyawan serta fungsinya
- b. Jumlah uang pesangon untuk masing-masing karyawan
- c. Waktu melaksanakan rencana tersebut atau
- d. Menawarkan uang pesangon kepada karyawan agar mengundurkan diri secara sukarela

Bila terdapat karyawan mengundurkan diri diluar rencana pemutusan hubungan kerja, perusahaan akan memahami kewajiban dan menjadi beban tahun berjalan yang dibayar secara tunai.

PT BPR Hayura Artalola untuk memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut di atas, telah melaksanakan dengan cara membentuk tabungan DPLK pada Bank BNI dan kewajiban imbalan kerja lainnya. Posisi saldo pengembangan dana sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp534.637.102 untuk DPLK BNI 46 dan JHT (Jaminan Hari Tua) pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebesar Rp919.871.150 serta saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp488.021.096 untuk DPLK dan BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp919.871.150.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

3. KAS

Saldo kas per 31 Desember 2024 dan 2023 , dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kas Teller	58.770.200	85.205.000
Jumlah	<u>58.770.200</u>	<u>85.205.000</u>

4. GIRO PADA BANK LAIN

Saldo rekening koran Bank per 31 Desember 2024 dan 2023 pada Bank lain, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bank Negara Indonesia	2.332.081	2.632.081
Bank Central Asia	122.384.828	122.794.828
Bank Niaga	11.387.328	11.747.329
Bank Mandiri	950.000	950.000
Bank Rakyat Indonesia	35.517.713	35.656.367
Bank Danamon	6.002.735	7.802.046
Bank BJB Padalarang	5.869.938	66.131.299
Bank BJB Soreang	4.545.265	154.708.591
Bank BNI LIK	2.297.772.801	3.022.170.840
Jumlah	<u>2.486.762.689</u>	<u>3.424.593.381</u>

5. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

Pendapatan bunga yang masih akan diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kredit Retail I	75.570.726	73.684.457
Kredit Retail II	370.773.236	267.949.551
Kredit Middle	105.281.154	160.887.407
Kredit Karyawan	9.752.580	11.657.512
Kredit TOP	-	-
Kredit Porsi Haji	566.461	164.673
Kredit Middle Special	101.843.193	77.851.144
Kredit Tanpa Agunan (KTA)	3.361.680	5.549.813
Kredit Sertifikasi	8.026.500	13.107.060
Pendapatan Bunga Giro, Tabungan & Deposito	-	-
Jumlah	<u>675.175.530</u>	<u>610.851.617</u>

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Saldo penanaman dana Bank dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan per 31 Desember 2024 dan 2023, terdiri dari :

	2024	2023
Deposito Berjangka		
Deposito On Call/MMA BNI 7 Hari Rate 2,5%	-	-
Jumlah Deposito Berjangka	-	-
Tabungan		
Tabungan Danamon	1.964.848.550	1.355.172.168
Tabungan Bank Mandiri Kopo	2.057.705.158	356.505.018
Tabungan Bank Muamalat	531.205	887.901
BPR Karyajatnika Sadaya	671.879.424	11.218.375
Jumlah Tabungan	4.694.964.336	1.723.783.462
Penempatan Pada Bank Lain	4.694.964.336	1.723.783.462
PPAP Penempatan Pada Bank Lain	(1.827.492)	(5.124.015)
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	4.694.964.336	1.718.659.447

Berdasarkan penelaahan dan evaluasi manajemen bank, kolektibilitas penempatan pada bank lain diklasifikasikan lancar.

Suku bunga penempatan pada Bank lain untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing 1%- 3,5% dan 1% - 3%.

- a) Tabungan yang dijadikan jaminan/agunan dari pinjaman diterima, sebesar Rp0,- Pada tahun 2024 dan Rp141.958.405,- pada tahun 2023.

Penempatan pada bank lain, menurut jangka waktunya :

	2024	2023
Penempatan pada bank lain, menurut jangka waktunya :		
Kurang dari 1 bulan	4.694.964.336	1.723.783.463
1 bulan	-	-
3 bulan	-	-
1 tahun	-	-
Jumlah	4.694.964.336	1.723.783.463

Mutasi penyisihan penghapusan penempatan pada Bank lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024	2023
Saldo awal 01 Januari 2024 dan 2023	5.124.015	-
Penyisihan	67.241.276	45.687.282
Pemulihan	(70.537.799)	(40.563.267)
Saldo akhir 31 Desember 2024 dan 2023	1.827.492	5.124.015
Penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk	1.827.492	5.124.015
Persentase PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk	100%	100%

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

7. KREDIT YANG DIBERIKAN

Baki debit kredit per 31 Desember 2024 dan 2023, yang terdiri dari :
 Jenis kredit :

	2024					
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Kredit Retail I	3.832.190.641	83.184.297	11.997.671	4.477.809	14.311.499	3.946.161.917
Kredit Retail II	17.338.058.398	1.026.874.775	231.878.487	87.577.313	42.496.318	18.726.885.291
Kredit Middle	4.815.624.871	443.366.542	58.342.242	52.473.852	140.993.845	5.510.801.352
Kredit Karyawan	1.532.594.702	-	-	-	-	1.532.594.702
Kredit KS	-	-	-	-	-	-
Kredit MSR	5.681.374.525	252.604.555	-	120.849.182	137.375.000	6.192.203.262
Kredit Sertifikasi	681.316.696	-	-	-	-	681.316.696
Kredit Porsi Haji	42.291.662	-	-	-	-	42.291.662
Kredit Tanpa Agunan	152.975.438	-	-	-	5.829.657	158.805.095
Jumlah	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.791.059.977
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	3.113.463
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(487.287.071)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(23.769.680)
Total Kredit	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.283.116.689

Sektor ekonomi :

	2024					
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pertanian	9.418.094.963	644.519.278	167.208.838	72.398.437	52.311.203	10.354.532.719
Perindustrian	2.922.354.330	215.097.326	7.104.537	12.458.321	39.156.032	3.196.170.546
Perdagangan	10.325.015.879	700.194.258	84.014.512	40.174.169	206.898.202	11.356.297.020
Jasa	3.534.950.477	49.484.327	27.284.105	44.756.794	42.640.882	3.699.116.585
Konsumtif	7.876.011.284	196.734.980	16.606.408	95.590.435	-	8.184.943.107
Jumlah	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.791.059.977
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	3.113.463
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(487.287.071)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(23.769.680)
Total Kredit	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.283.116.689

Jangka Waktu :

	2024					
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	664.683.773	200.000.000	-	-	-	864.683.773
1 - 5 tahun	33.411.743.160	1.606.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	35.926.376.204
Jumlah	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.791.059.977
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	3.113.463
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(487.287.071)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(23.769.680)
Total Kredit	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.283.116.689

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Jenis Kredit :

	2023					
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Kredit Retail I	3.596.652.355	146.012.174	6.575.342	5.595.000	7.493.782	3.762.328.653
Kredit Retail II	14.396.858.755	771.550.381	69.007.413	33.384.084	25.711.055	15.296.511.688
Kredit Middle	9.353.794.052	1.134.447.831	84.026.564	171.495.794	381.081.273	11.124.845.514
Kredit Karyawan	2.516.719.403	-	-	-	-	2.516.719.403
Kredit KS	968.136.147	22.354.173	-	-	-	990.490.320
Kredit MSR	-	-	-	-	-	-
Kredit TOP	-	-	-	-	-	-
Kredit Porsi Haji	18.749.999	-	-	-	-	18.749.999
Kredit Tanpa Agunan	235.225.467	5.916.061	8.537.316	-	-	249.678.844
Jumlah	31.086.136.178	2.080.280.620	168.146.635	210.474.878	414.286.110	33.959.324.421
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	73.332
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(439.802.967)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(24.654.808)
Total Kredit	31.086.136.178	2.080.280.620	168.146.635	210.474.878	414.286.110	33.494.939.978

Sektor Ekonomi :

	2023					
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pertanian	8.745.764.592	1.044.830.823	63.975.579	24.523.149	18.302.315	9.897.396.458
Perindustrian	2.340.247.937	190.115.321	23.660.260	14.985.678	29.795.630	2.598.804.826
Perdagangan	8.906.529.801	614.672.341	37.997.479	52.040.762	231.109.623	9.842.350.006
Jasa	2.734.852.851	69.143.238	-	87.814.347	42.895.571	2.934.706.007
Konsumtif	8.358.740.997	161.518.897	42.513.317	31.110.942	92.182.971	8.686.067.124
Jumlah	31.086.136.178	2.080.280.620	168.146.635	210.474.878	414.286.110	33.959.324.421
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	73.332
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(439.802.967)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(24.654.808)
Total Kredit	31.086.136.178	2.080.280.620	168.146.635	210.474.878	414.286.110	33.494.939.978

Jangka Waktu :

	2023					
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	1.741.838.855	25.888.586	5.274.932	-	13.992.559	1.786.994.932
1 - 5 tahun	29.344.297.323	2.054.392.034	162.871.703	210.474.878	400.293.551	32.172.329.489
Jumlah	31.086.136.178	2.080.280.620	168.146.635	210.474.878	414.286.110	33.959.324.421
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	73.332
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(439.802.967)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(24.654.808)
Total Kredit	31.086.136.178	2.080.280.620	168.146.635	210.474.878	414.286.110	33.494.939.978

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Dari jumlah kredit yang ada per 31 Desember 2024 dan 2023 tersebut termasuk didalamnya kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing sebesar Rp1.560.691.950 dan sebesar Rp2.174.586.676 Kredit yang diklasifikasikan lancar sebesar Rp1.560.691.950 dan perhatian khusus sebesar Rp0.

Informasi pokok :

- Kredit dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*) benda bergerak dan atau tidak bergerak dengan pengikatan secara hak tanggungan dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh bank.
- Suku bunga kredit dalam rupiah periode 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing 12% - 18% dan 16,8% - 18%
- Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.
- Kredit modal kerja diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja.
- Kredit yang diberikan kepada karyawan Bank merupakan kredit untuk kesejahteraan yang dibebani bunga per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 12% dan 12% dengan jangka waktu 5 tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.
- Rasio Non-Performing Loan (NPL) perusahaan (secara bruto) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 0,90% dan 0,88%.

Mutasi penyisihan penghapusan kredit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut :

	2024	2023
Saldo awal 01 Januari 2024 dan 2023	338.668.604	68.659.083
Penyisihan periode berjalan	542.926.822	695.822.378
Penghapusan kredit	-	-
Pemulihan	(586.395.777)	(425.812.857)
Penyisihan penghapusan kredit yang telah dibentuk	295.199.649	338.668.604
Penyisihan penghapusan kredit yang wajib dibentuk	<u>295.199.649</u>	<u>338.668.604</u>
Persentase PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk	100%	100%

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penghapusan kredit tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit tersebut.

8. ASET TETAP

Saldo nilai buku Aset tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024			
<i>Nilai Perolehan :</i>	Saldo per 31-12-2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31-12-2024
Tanah	386.700.000	-	-	386.700.000
Bangunan	603.417.308	-	-	603.417.308
Kendaraan	787.184.400	200.050.000	180.289.400	806.945.000
Inventaris Lainnya	127.409.900	37.276.534	-	164.686.434
Inventaris Peralatan kantor	453.299.544	7.764.600	-	461.064.144
Jumlah nilai perolehan	2.358.011.152	245.091.134	180.289.400	2.422.812.886
<i>Akumulasi Penyusutan :</i>				
Bangunan	377.135.810	30.170.865	-	407.306.675
Kendaraan	443.412.026	112.370.833	180.289.400	375.493.459
Inventaris Lainnya	117.488.986	11.038.620	-	128.527.606
Inventaris Peralatan kantor	396.360.818	27.283.417	-	423.644.235
Jumlah akumulasi penyusutan	1.334.397.640	180.863.735	180.289.400	1.334.971.975
Nilai Buku	1.023.613.512			1.087.840.911

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

8. ASET TETAP (lanjutan)

2023

Nilai Perolehan :	Saldo per 31-12-2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31-12-2023
Tanah	386.700.000	-	-	386.700.000
Bangunan	603.417.308	-	-	603.417.308
Kendaraan	768.809.400	18.375.000	-	787.184.400
Inventaris Lainnya	127.409.900	-	-	127.409.900
Inventaris Peralatan kantor	427.651.000	25.648.544	-	453.299.544
Jumlah nilai perolehan	2.313.987.608	44.023.544	-	2.358.011.152
<i>Akumulasi Penyusutan :</i>				
Bangunan	346.964.945	30.170.865	-	377.135.810
Kendaraan	368.510.457	74.901.569	-	443.412.026
Inventaris Lainnya	109.200.992	8.287.994	-	117.488.986
Inventaris Peralatan kantor	352.109.944	44.250.874	-	396.360.818
Jumlah akumulasi penyusutan	1.176.786.338	157.611.302	-	1.334.397.640
Nilai Buku	1.137.201.270			1.023.613.512

Penambahan kendaraan tahun 2024 sebesar Rp 200.050.000 merupakan pembelian 1 unit Daihatsu Grandmax van 2024.

9. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	2024	2023
Sewa gedung	49.848.605	91.340.973
Persediaan ATK/barang cetakan	25.597.200	20.635.400
Persediaan materai tempel/teraan/perangko	5.190.000	820.000
Persediaan Map dan buku tabungan (Pass Book)	10.600.000	7.130.000
Beban ditangguhkan software	-	2.797.200
PPOB Hayura VSI	37.947.468	40.609.746
Tagihan Settlement VA Bank	16.466.720	64.586.300
Tagihan Settlement Alfamart	6.761.500	8.045.900
Tagihan Settlement Indomaret	340.000	708.000
Uang Muka macam-macam biaya	-	-
Jumlah	152.751.493	236.673.519

10. KEWAJIBAN SEGERA

Kewajiban segera per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	2024	2023
Asuransi	32.696.602	15.944.732
Notaris	4.750.000	4.150.000
Jamsostek dan DPLK	-	-
Lainnya	-	-
Jumlah	37.446.602	20.094.732

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

11. UTANG BUNGA

Utang bunga per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bunga tabungan	1.716.501	4.811.679
Bunga deposito	38.712.619	47.067.469
Bunga pinjaman diterima	10.325.328	-
Bunga jatuh tempo	6.794.461	2.384.455
Jumlah	<u>57.548.909</u>	<u>54.263.603</u>

12. UTANG PAJAK

Utang pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PPH bunga tabungan	8.603.263	7.185.639
PPH bunga deposito	9.045.129	6.878.190
PPH pasal 25 dan 29	153.355.219	138.535.725
PPH pasal 21	4.746.677	53.823.538
PPH pasal 23	130.974	13.328
Jumlah	<u>175.881.262</u>	<u>206.436.420</u>

PPH pasal 25/29 sebesar Rp153.355.219 merupakan utang kekurangan pph pasal 29 Tahun 2024.

13. SIMPANAN

Saldo simpanan per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Tabungan	19.350.396.012	18.079.504.611
Deposito berjangka	13.547.600.000	14.479.100.000
Jumlah	<u>32.897.996.012</u>	<u>32.558.604.611</u>

Tabungan

Penempatan dana masyarakat dalam bentuk tabungan periode 31 Desember 2024 dan 2023 dengan tingkat suku bunga sebesar 3% - 4% per tahun dan 3% - 4% per tahun

Jumlah tabungan yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 pada Bank masing-masing sebesar Rp123.807.000 dan Rp3.638.185 Terdapat tabungan yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BPR pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0, dan Rp141.958.405.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Menurut jangka waktunya :		
1 bulan	500.000.000	250.000.000
3 bulan	5.679.500.000	3.722.000.000
6 bulan	4.240.000.000	7.914.000.000
12 bulan	3.128.100.000	2.593.100.000
Jumlah	<u>13.547.600.000</u>	<u>14.479.100.000</u>

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

13. SIMPANAN (lanjutan)

Jumlah deposito berjangka yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 pada Bank masing-masing sebesar Rp150.000.000. dan Rp60.000.000. Deposito yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BPR masing-masing sebesar Rp0, dan Rp979.300.000. Tingkat suku bunga deposito berjangka periode 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing antara 4% - 6,75% dan 4% - 6,25%.

14. PINJAMAN DITERIMA

Pinjaman diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	2024	2023
Pinjaman yang diterima lainnya - Bank lain :		
- BPR Karyajatnika Sadaya	4.130.131.338	-
Pinjaman yang diterima lainnya - Non Bank :		
- Bank BJB KMK Tahap 2	-	-
Dikurangi :		
Biaya provisi	(39.999.988)	-
Biaya transaksi	(24.055.388)	-
Jumlah Pinjaman Diterima	4.066.075.962	-

- BPR KARYAJATNIKA SADAYA

Berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor : SPPK/017/Maret/2024 tanggal 17 Mei 2024

Kredit	Rp 5.000.000.000
	Rp 4.000.000.000 KAB-LB 1
	Rp 1.000.000.000 KAB-LB 2
Keperluan	Modal kerja BPR
Bentuk	KAB-LB SME
Suku bunga	9% Efektif setara dengan 4.83% Flat
Jangka Waktu	36 Bulan
Jaminan	- 1 Unit T/B di Jl. Raya Propinsi No. 139 Desa. Pasitjrumbu, Kec. Pasitjrumbu, Kab. Bandung-SHGB No. 2 a.n PT. Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola (LT:389 m2, LB: 386.33 m2 masa berakhir hak guna bangunan : 06/12/2041)

15. KEWAJIBAN LAIN – LAIN

Kewajiban lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	2024	2023
Cadangan pendidikan	141.747.958	127.064.160
Angsuran Bunga	5.203.162	3.132.578
Lainnya	17.935.000	39.354.800
Jumlah	164.886.120	169.551.538

Cadangan Pendidikan adalah dana cadangan Pendidikan yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan POJK 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan kualitas sumber daya manusia BPR dan BPR Syariah, yaitu sebesar 3% dari biaya personalia (biaya tenaga kerja) tahun lalu.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

16. MODAL

Modal Bank per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	2024	2023
Modal dasar	5.000.000.000	5.000.000.000
Modal belum ditempatkan dan disetor	(2.800.000.000)	(2.800.000.000)
Modal yang telah ditempatkan dan disetor	2.200.000.000	2.200.000.000

Modal disetor tersebut telah dicatat dalam data base Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat No.AHU-11809.A.H.01.02 tahun 2009 tanggal 07 Oktober 2010 dan telah dicatat dalam administrasi bank Indonesia dengan surat No.12/655/DKBU/IDAd/Bd tanggal 26 Mei 2010. Perubahan komposisi penambahan modal disetor tahun 2010 telah ditatausahakan dalam administrasi pengawas Bank Indonesia sesuai dengan surat Nomor :13/86/DKBU/IDAd/Bd tanggal 25 Januari 2011.

Berdasarkan risalah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa (RUPSLB) PT BPR Hayura Artalola pada tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dibawah tangan disepakati menyetujui perubahan modal dasar menjadi Rp3.000.000.000, dan menyetujui melakukan tambahan setoran modal sebesar Rp1.200.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Yanti Rahmayanti S.H. nomor 01 tanggal 12 Desember 2013 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) sesuai Surat Keputusan Menhukham nomor AHV – 03132.AH.01.02 tanggal 22 Januari 2014, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Menyetujui perubahan modal dasar dari Rp2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000 (Lima milyar rupiah).

Berdasarkan Surat yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/Hal/Dir/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, perihal Laporan Perubahan Modal Dasar BPR, dan nomor 07/Hal/Dir/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal Laporan Perubahan Komposisi kepemilikan BPR.

Sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-99/KR.2012/2016 tanggal 29 Januari 2016, bahwa perubahan anggaran dasar dari Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta penambahan modal di setor sebesar Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), disetujui dan ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, komposisi saham BPR menjadi :

No	Nama Pemilik	Jumlah lembar	Jumlah nominal	Persentase
1	Hj. Gusti Nurmahrta	22.380	1.119.000.000	50,86%
2	H. Mutiq Yusmita Hadyat	20.540	1.027.000.000	46,68%
3	Dedi Rusamsi	1.080	54.000.000	2,46%

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

16. MODAL (lanjutan)

Cadangan per 31 Desember 2024 dan 2023, terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Cadangan umum	1.040.000.000	1.040.000.000
	<u>1.040.000.000</u>	<u>1.040.000.000</u>

17. PENDAPATAN BUNGA

- Bunga kontraktual :

Bunga yang diperoleh per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Penempatan pada bank lain	58.311.863	50.521.632
Kredit yang diberikan	9.223.144.120	8.234.850.608
Bunga lainnya	435.060.150	413.024.400
Jumlah Bunga Yang Diperoleh	<u>9.716.516.133</u>	<u>8.698.396.640</u>

- Provisi dan komisi

Provisi dan komisi per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Modal kerja	478.967.396	443.273.510
Bunga kredit - adm	(859.869)	(6.668)
Jumlah Provisi dan Komisi	<u>478.107.527</u>	<u>443.266.842</u>

18. BEBAN BUNGA

Beban bunga per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban pihak ketiga bank lain		
Beban bunga deposito	408.662.133	510.954.376
Beban bunga pinjaman diterima	253.448.266	3.681.044
Beban bunga ABP lainnya	7.394.900	7.105.332
Jumlah Beban Bunga Pihak Ketiga Bank Lain	<u>669.505.299</u>	<u>521.740.752</u>

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban pihak ketiga		
Beban bunga tabungan	507.948.730	436.577.180
Beban bunga deposito	497.127.798	401.822.160
Beban bunga pinjaman diterima	-	-
Beban bunga provisi	10.000.012	876.734
Beban bunga biaya transaksi	6.013.928	1.693.046
Beban bunga pihak ketiga lainnya	67.659.269	62.954.611
Jumlah Beban Pihak Ketiga	<u>1.088.749.737</u>	<u>903.923.731</u>
Jumlah Beban Bunga	<u>1.758.255.036</u>	<u>1.425.664.483</u>

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

19. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan operasional lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	2024	2023
Tabungan/deposito	69.359.872	66.569.417
Denda kredit	155.642.267	147.799.224
Penghapusan kredit diberikan	4.077.800	17.218.556
Pemulihan Aktiva Produktif	573.923.902	466.026.971
Payment Point	5.997.106	7.203.140
Penyesuaian PPAP	-	349.150
Pinalti	545.228	5.580.548
Administrasi lainnya	8.896.400	9.239.100
Lainnya	49.347.497	59.800.080
Jumlah	867.790.072	779.786.186

20. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN/PENYUSUTAN

Beban penyisihan kerugian/penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	2024	2023
Penyisihan		
- Bank Non Giro	67.241.276	45.687.282
- Kredit yang diberikan	542.926.822	695.822.378
Jumlah beban penyisihan aset produktif	610.168.098	741.509.660
Penyusutan		
- Beban penyusutan aset tetap	180.863.699	157.611.302
Jumlah beban penyusutan aset tetap	180.863.699	157.611.302
Jumlah beban penyisihan/penyusutan	791.031.797	899.120.962

21. BEBAN PEMASARAN

Beban pemasaran per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	2024	2023
Beban promosi dan iklan	118.924.635	69.860.961
Jumlah Beban Pemasaran	118.924.635	69.860.961

22. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Beban administrasi dan umum merupakan beban karyawan, beban administrasi dan umum dan beban operasional lainnya terdiri dari :

	2024	2023
Beban karyawan	5.013.564.382	4.709.639.917
Beban pendidikan	156.339.198	184.021.419
Beban sewa	75.257.725	75.445.941
Beban premi asuransi	224.986.979	207.824.316
Beban barang dan jasa	376.970.809	361.851.133
Pajak (kendaraan & lainnya)	19.011.782	29.855.380
Beban pemeliharaan dan perbaikan	347.387.805	229.353.940
Beban operasional lainnya	63.322.769	51.547.979
Jumlah	6.276.841.449	5.849.540.025

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

22. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (lanjutan)

Beban karyawan sebesar Rp4.719.347.686 termasuk di dalamnya setoran JHT (Jaminan Hari Tua) pada BPJS Ketenagakerjaan dan setoran DPLK.

23. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Selisih kas	11.112	11.947
Lainnya	79.676.238	6.491.224
Jumlah pendapatan non operasional	<u>79.687.350</u>	<u>6.503.171</u>
Beban non operasional :		
Beban sumbangan/hadiah	45.144.800	300.000
Beban selisih kas	10.014	9.698
Rugi penjualan AYDA	-	-
Lainnya	28.643.700	83.140.047
Jumlah beban non operasional	<u>73.798.514</u>	<u>83.449.745</u>
Jumlah	<u>5.888.836</u>	<u>(76.946.574)</u>

24. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	2.123.249.651	1.600.316.663
Tambah (kurang) beda tetap :		
- Pendapatan Tabungan dan Deposito	(69.359.872)	(66.569.417)
- Beban penjamuan nasabah	-	-
- Beban operasional lainnya	63.322.769	51.547.979
- Beban sumbangan	45.144.800	300.000
- Biaya non operasional lainnya	10.014	9.698
- Cadangan biaya pendidikan	14.683.798	127.000.000
- Biaya lain-lainnya	28.643.700	83.140.047
Jumlah	<u>82.445.209</u>	<u>195.428.307</u>
Laba (rugi) kena pajak menurut akuntansi	<u>2.205.694.860</u>	<u>1.795.744.970</u>
- Biaya penyusutan	-	-
- Biaya imbalan kerja	-	-
Tambah (kurang) beda temporer :	-	-
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>2.205.694.860</u>	<u>1.795.744.970</u>
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	<u>2.205.694.860</u>	<u>1.795.744.970</u>

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

24. BEBAN PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

$$\begin{array}{r} 4.800.000.000 \\ 11.142.101.082 \end{array} \times 2.205.694.860 = 950.209.951$$

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$2.205.694.860 - 950.209.951 = 1.255.484.909$$

Pajak penghasilan 2024

$$\begin{array}{r} 50\% \times 22\% \times 950.209.951 = 104.523.095 \\ 22\% \times 1.255.484.909 = 276.206.680 \end{array}$$

Jumlah pajak penghasilan	380.729.775
Pajak dibayar dimuka-PPh Pasal 25	(365.425.000)
(Kelebihan) kekurangan PPh Pasal 29	15.304.775

Pajak penghasilan 2023

$$\begin{array}{r} 50\% \times 22\% \times 868.212.570 = 95.503.383 \\ 22\% \times 927.531.899 = 204.057.018 \end{array}$$

Jumlah pajak penghasilan	299.560.400
Pajak dibayar dimuka-PPh Pasal 25	(161.024.675)
(Kelebihan) kekurangan PPh Pasal 29	138.535.725

Pada tahun 2021, tarif perhitungan PP badan berubah menjadi 22% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

25. TAGIHAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Komitmen dan kontinjensi per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	2024	2023
Aset kontinjensi	-	-
Bunga kredit yang diberikan	-	-
Aset produktif yang dihapus buku	-	-
Jumlah aset komitmen dan kontinjensi	-	-

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

26. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan normal usahanya, PT BPR Hayura Artalola melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan karyawan kunci Bank dan pemegang saham antara lain sebagai berikut:

<u>Pihak yang mempunyai hubungan istimewa</u>	<u>Sifat hubungan istimewa</u>	<u>Transaksi</u>
H. Mutiq Yusmita Hadyat	Komisaris dan Pemegang saham	Kredit dan Tabungan
Hj.Gusti Nurmahrta	Pemegang Saham	Kredit dan Tabungan
Tatan Suratman	Komisaris	Tabungan
Dedi Rusamsi	Direksi dan Pemegang saham	Kredit dan tabungan
Teulis Ratna Komala	Direksi	Kredit dan Tabungan

Transaksi dan saldo dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta prosentasenya terhadap masing-masing total transaksi dan saldo akun-akun yang terkait, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.102.500.008 dan Rp2.174.586.676 dengan presentase terhadap modal inti dan modal pelengkap sebesar 16,38% dan 32,8%.
- b. Deposito berjangka diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp150.000.000 dan Rp60.000.000 dengan presentase terhadap jumlah simpanan deposito sebesar 0,52% dan 0,77%.
- c. Tabungan yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp123.807.000 dan Rp3.638.185 dengan presentase terhadap jumlah simpanan tabungan sebesar 0,43% dan 4%.

27. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 15/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang berakhirnya tugas dan penutupan BPPN, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004, Pemerintah Indonesia membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, sebuah institusi baru yang menggantikan BPPN, untuk melanjutkan pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah atas kewajiban pada Bank-bank lokal. Dan untuk Pelaksanaan Program Penjaminan tersebut Pemerintah membentuk lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud yaitu dengan disahkannya Undang-undang No. 24 pada tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemerintah membebaskan premi berkaitan dengan program penjaminan tersebut sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode yang dibayarkan 2 (dua) kali setahun.

28. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Bahwa dalam rangka penyempurnaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan perkembangan produk serta pelayanan terutama yang berbasis teknologi informasi, risiko pemanfaatan BPR dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi maka Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan POJK Nomer 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penertapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

28. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (lanjutan)

Penerapan program anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sedikitnya mencakup :

- Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Pengendalian Intern
- Sistem Informasi Management
- Sumber Daya Manusia

Direksi bertanggung jawab atas penerapan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris (APU & PPT) di Sektor Jasa Keuangan, dengan membentuk unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan sesuai dengan peraturan tersebut.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

29. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

KETERANGAN	NOMINAL	BOBOT RESIKO	ATMR
1. Kas	58.770.00	0%	-
2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	0%	-
3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.	75.187.00	0%	-
4. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1(satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	0%	-
5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR.	-	15%	-
6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	-	0%	-
7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.			
a. Kredit kepada bank lain	-	20%	-
b. Kredit kepada Pemerintah Daerah	-	20%	-
c. Bagian Kredit yang dijamin oleh bank lain	-	20%	-
d. Bagian Kredit yang dijamin oleh Pemerintah Daerah	-	20%	-
8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	-	20%	-
9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.	7.527.499.00	30%	2.258.250.40
10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20 %.			
a. Kredit Kepada BUMN/BUMD	-	50%	-
b. Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%	-	50%	-
11. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan yang memenuhi persyaratan.	-	50%	-
12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan surat kuasa menjual yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.	3.588.379.00	50%	1.794.190.00
13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan	18.019.428.00	70%	12.613.601.00
14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu	355.958.00	70%	249.170.50
15. Tagihan atau kredit lainnya yg tidak memenuhi kriteria bobot risiko diatas	6.829.430.00	100%	6.829.430.00
16. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet			
a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	10.294.00	100%	10.294.00
b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	256.691.00	100%	256.691.00
17. Aset tetap, inventaris dan aset tidak berwujud	1.087.841.00	100%	1.087.841.00
18. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	-	100%	-
19. Aset lainnya selain tersebut di atas.	877.927.00	100%	877.927.00
Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum	-	0%	27.365.723.20
Selisih lebih PPAP Umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap -/-	-		-
Jumlah ATMR	45.854.108.066.00	0%	27.365.723.20

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

29. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (lanjutan)

d. Kualitas Aktiva Produktif

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Kredit	Surat Berharga	Penempatan pada Bank Lain	Jumlah
1. Aktiva Produktif				
- Lancar	34.076.427	-	7.176.651	41.253.078
- Dalam Perhatian Khusus	1.806.030			1.806.030
- Kurang Lancar	302.218	-	-	302.218
- Diragukan	265.378	-	-	265.378
- Macet	341.006	-	-	341.006
Jumlah	36.791.060	-	7.176.651	43.967.711
2. Aktiva Produktif				
Yang Diklasifikasikan				
- Dalam Perhatian Khusus	-	-	-	-
- Kurang Lancar (50%)	151.109	-	-	151.109
- Diragukan (75 %)	199.034	-	-	199.034
- Macet (100 %)	341.006	-	-	341.006
Jumlah	691.149	-	-	691.149
3. PPAWD				
- Lancar (0 %)	170.041	-	1.793	171.834
- Dalam Perhatian Khusus (3%)	16.071	-	-	16.071
- Kurang Lancar (10 %)	13.903	-	-	13.903
- Diragukan (50 %)	13.904	-	-	13.904
- Macet (100 %)	81.315	-	-	81.315
Jumlah	295.234	-	1.793	297.027
Rasio - Rasio				
	a. $\frac{\text{Aktiva produktif yang diklasifikasikan}}{\text{Aktiva produktif}} \times 100 \% =$			1,57%
	b. $\frac{\text{Penyisihan penghapusan Aktiva produktif}}{\text{PPAP yang wajib dibentuk}} \times 100 \% =$			100%

e. Aset Tetap Terhadap Modal

$$\frac{1.087.842}{2.200.000} \times 100\% = 49\%$$

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

29. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (lanjutan)
f. Loan to Deposit Ratio

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Nominal	Prosentase (%)
1. Simpanan Pihak Ke III		
1.1 Simpanan Berjangka	13.547.600	32.59%
1.2 Tabungan	19.350.396	46.55%
2. Pinjaman diterima lebih dari 3 bulan*	1.800.000	
3. Modal Pinjaman	-	-
4. Modal Inti	6.868.912	16.52%
5. Jumlah Dana Pihak Ke III	41.566.908	95.67%
6. Aktiva Produktif		
6.1 Kredit yang diberikan**	36.791.060	100%
6.2 Kredit yang diberikan kepada bank lain**	-	-
6.3 Lainnya	-	-
7. Jumlah Aktiva Produktif	36.791.060	
8. LDR {6(1+2+3) : 5} x 100%	88,51%	

g. Return on Asset (ROA)

$$\frac{2.123.249}{45.142.354} \times 100\% = 4,07\%$$

h. Return on Earning (ROE)

$$\frac{2.123.249}{6.868.912} \times 100\% = 30,91\%$$

i. Cash Ratio

$$\frac{7.140.497}{28.642.237} \times 100\% = 24,93\%$$

j. Beban Operasional Pendapatan Operasional

$$\frac{745.421}{921.867} \times 100\% = 80,86\%$$

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

30. INFORMASI LAIN

Kredit tahun 2024 mengalami pertumbuhan dari posisi tahun 2023 sebesar 8.32% dan dana pihak ketiga tumbuh hanya 1.04% hambatan karena usaha yang mengalami kontraksi, resiko kredit yang meningkat membuat BPR harus selektif dalam memberikan kredit. Disamping itu, BPR menjaga likuiditas yang kondisinya terbatas karena dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito juga masih tertekan.

Secara keseluruhan total aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.255.867.850 mengalami kenaikan sebesar 7%, dibandingkan total aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.572.740.909.

31. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Bank untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang diselesaikan masing-masing pada bulan Februari 2024 dan 2023.

32. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

1. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP)

Pad tanggal 1 Januari 2025, BPR mulai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penerapan SAK EP ini menggantikan penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Dengan adanya transisi dari SAK-ETAP ke SAK-EP, BPR telah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Akuntansi yang relevan dan melakukan penilaian terhadap dampak perubahan tsb. Terhadap laporan keuangan. Perubahan kebijakan Akuntansi ini mencakup antara lain, pengakuan pendapatan pengukuran aset dan kewajiban, serta pengungkapan informasi keuangan.

2. Dampak Penerapan SAK EP.

Penerapan SAK EP akan berdampak pada beberapa pos dalam laporan keuangan, antara lain:

a. Pengakuan pendapatan

Pengakuan pendapatan untuk beberapa transaksi akan dilakukan berdasarkan pendekatan yang berbeda, yang mungkin mempengaruhi waktu pengakuan pendapatan pada periode sebelumnya.

b. Pengakuan aset dan kewajiban

Beberapa aset dan kewajiban akan diukur dengan dasar yang berbeda, yang dapat mempengaruhi nilai tercatat atas aset dan kewajiban tersebut.

c. Pengungkapan informasi

SAK EP mengharuskan pengungkapan yang lebih lengkap dibandingkan dengan standar sebelumnya, yang dapat mempengaruhi jumlah dan jenis informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

d. BPR telah melakukan persiapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan SAK EP dilakukan dengan memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta akan terus melakukan evaluasi terhadap dampak implementasi standar ini terhadap laporan keuangan.